

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 29
Mei 2021



Meretas Batas BTS

BTS 4G
Supaya Indonesia
Terkoneksi

Legenda 1000 Candi:
Cerita di Balik BTS 4G
untuk Indonesia

Cerilya BAKTI Menyobek
Sekat Informasi dan
Komunikasi di Wilayah 3T

BAKTI Kominfo sebagai
Tonggak Akselerasi
Transformasi Digital di Indonesia



TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.
Walbertus Natalius W.
Primus A Latu B.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara

Produksi:
Fahmi Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.
9, Jakarta Pusat

BTS 4G

untuk Indonesia Maju

Salam Tangguh. Masih dalam momentum perayaan hari besar keagamaan, izinkan kami Tim Majalah Kominfo Next mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah bagi umat muslim, dan selamat merayakan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia.

Semoga kiranya momentum dua hari besar keagamaan yang diperingati secara bersamaan ini dapat terus mengokohkan semangat persatuan dan kesatuan kita dalam membangun negeri, membangun Indonesia yang terkoneksi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital di masa mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata di seluruh Tanah Air. Setidaknya, sampai akhir tahun 2022 nanti, semua wilayah di Indonesia akan mendapatkan layanan internet jaringan 4G, baik di pusat-pusat perkotaan hingga pelosok desa/kelurahan. Narasi besar mengenai inklusi digital inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian serius pemerintah saat ini.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menjawab upaya dan komitmen mewujudkan pemerataan akses internet, mengurangi kesenjangan digital atau *digital divide* tersebut melalui pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS). Tahapan pembangunan yang kini terus berlanjut diharapkan mampu mendorong daya saing masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital, baik untuk menunjang produktivitas dan aktivitas sehari-hari dengan tujuan ikut mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

Target penyelesaian infrastruktur BTS hingga akhir tahun 2022 ditandai dengan peletakan batu pertama atau *ground breaking* di desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada 22 April lalu. Menteri Kominfo didampingi Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Dirut BAKTI) Anang Latif memastikan, dimulainya *ground breaking* tersebut menjadi penanda Indonesia akan mengakhiri kesenjangan digital.

Sebelumnya, BAKTI Kementerian Kominfo secara bertahap juga telah melakukan penandatanganan kontrak payung 5 Paket BTS 4G bersama pemenang konsorsium. Adapun paket 1 menjangkau kepulauan Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Paket 2 mencakup Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Paket 3 menjangkau Provinsi Papua Barat dan sebagian Provinsi Papua, serta paket 4 dan paket 5 untuk wilayah Papua bagian tengah dan Papua bagian timur.

Inilah wajah Indonesia sebagai bangsa digital dalam beberapa tahun ke depan yang didukung dengan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang inklusif. Tentu semangat menyatukan Indonesia di sektor Kominfo sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan percepatan transformasi digital nasional. Oleh karena itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyerukan semangat dan kerja kolaborasi lintas sektor, lintas mitra dan lintas ekosistem lainnya untuk memastikan Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju.

Kepada pembaca Majalah Kominfo Next. Tepat di tanggal 20 Mei 2021, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke-113 tahun. Momentum Harkitnas juga penting untuk kita refleksi perjalanan bangsa ini. Oleh karenanya, Menteri Kominfo mengajak kita sekalian untuk bangkit dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan secara bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa.

“Bangkit, kita bangsa yang tangguh!”

– Menkominfo Johnny G. Plate --

Selamat membaca!

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



@FSetu



@FSetu



FSetu TV

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

8 Rak Buku

14 Teknologi & Gadget

18 KominfoPedia

20 Menkominfo Bicara

24 Kabar Istana

28 Liputan Utama

48 Portal Kominfo

56 Kominfo Muda

60 OpiNext

62 Foto Esai

66 KominfoTalk

72 Liputan Khusus

82 Jurnal Foto

84 Kabar Seputar COVID-19

86 Lintas Kominfo

92 Top 10 Hoaks

COVER STORY

MERETAS

MERETAS
MERETAS



ANANG ACHMAD LATIF
Direktur Utama BAKTI



TRI HARYANTO
Kepala Satuan
Pemeriksaan Intern



BAMBANG NOEGROHO
Direktur Infrastruktur



AHMAD JUHARI
Direktur Keuangan



DANNY JANUAR ISMAWAN
Direktur Layanan untuk
Masyarakat dan Pemerintah



DHIA ANUGRAH FEBRIANSA
Direktur Layanan
untuk Badan Usaha



FADHILAH MATHAR
Direktur Sumber Daya
dan Administrasi

BATAS BTS



Cover majalah **KominfoNext** kali ini sangat spesial karena secara terang-terangan menyajikan reka ulang cover majalah yang menampilkan sebuah *boyband* Korea yang sedang hits, BTS. Ya, BTS adalah sebuah ikon yang tak asing bagi dunia panggung hiburan saat ini berkat pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa.

Kerja keras, disiplin, kemampuan vokal dan koreografi, prestasi, kesuksesan, dan transformatif adalah *hashtag* yang melekat sebagai predikat mereka saat ini.

Kominfo punya kesempatan yang sama untuk menjadi inspirasi, setidaknya bagi masyarakat Indonesia. Kesempatan itu, kebetulan juga berkaitan dengan BTS. Namun, BTS yang ini merupakan suatu

hal yang berbeda, yang ini adalah BTS -- *Base Transceiver Station*, yang juga sedang sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan transformasi digital.

Sejarah akan mencatat Kominfo melalui proyek pembangunan 7904 BTS 4G baru dalam dua tahun ini agar bisa menggandeng warga di daerah 3T ikut dalam arus transformasi digital dunia. Kita bawa semua elemen masyarakat agar semakin digital dan semakin maju menuju panggung dunia. *And no one will be left behind.*

Kebetulan "pelaksana proyek" ini adalah BAKTI yang tujuh personil pucuknya tampil di cover edisi ini. Tujuh, sama seperti jumlah personel BTS dari Negeri Ginseng yang kiprahnya inspiratif. Dengan semangat dan energi yang meluap-luap bagai anak muda, mereka sedang bersemangat mewujudkan Indonesia yang terkoneksi: semakin digital, semakin maju. Bersemangat untuk meretas batas-batas kendala bagai dinamit.

**'Cause I'm
in the stars tonight**

**So watch me bring the fire
and set the night alight
Shining through the city
with a little funk and soul
So I'ma light it up like **dynamite****

(Dynamite, BTS)

Sumber Foto : <https://www.wsj.com/articles/bts-cover-story-interview-be-new-album-dynamite-11605114374>



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30



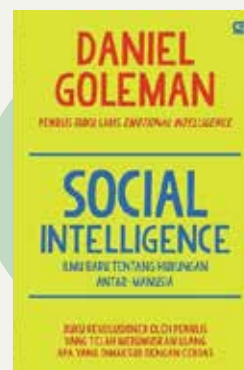
Rak Buku

Penulis :
Malcolm Frank

Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Mesin Melakukan Semuanya

Internet of Things telah merekonstruksi cara-cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Industri-industri mulai melakukan transformasi, dan banyak karier akan mengalami kemajuan atau kemunduran.

Buku ini menjelaskan apa yang nyata, diiringi dengan kerangka kerja yang kuat untuk merangkul perubahan ini, demi memastikan Anda dan bisnis Anda tetap kompetitif dalam dekade ke depan. Ditulis oleh pemimpin-pemimpin dari Cognizant, salah satu perusahaan layanan IT profesional terbesar di dunia, panduan lapangan ini menyediakan sebuah *action plan* bagi para pemimpin di seluruh *level* agar dapat bertahan di era mesin-mesin cerdas.



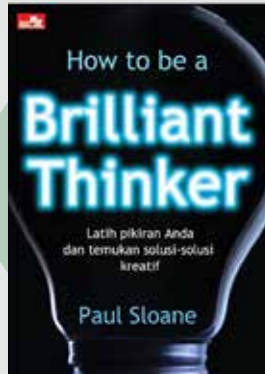
Rak Buku

Penulis :
Daniel Goleman

Social Intelligence Ilmu Baru Tentang Hubungan Antar-Manusia

Penemuan paling mendasar di buku ini adalah pada hakikatnya kita memiliki sifat sosial untuk terus-menerus terlibat dalam suatu "tarian saraf" yang menghubungkan otak kita dengan otak orang-orang di sekitar kita.

Goleman menjelaskan dasar dari karisma dan kekuatan emosi, kompleksitas daya tarik seksual. Bagaimana bahwa kesan pertama ternyata memiliki tingkat keakuratan yang mencengangkan, dan bagaimana kita bisa menduga seseorang berbohong atau tidak.



Penulis :
Paul Sloane

How To Be A Brilliant Thinker

Latih Pikiran Anda dan Temukan Solusi-Solusi Kreatif

Keluar dari belenggu berpikir konvensional akan membuat Anda berbeda & unik, membantu Anda memecahkan masalah, bahkan menemukan solusi-solusi dengan cara yang inovatif. *How to be a BRILLIANT THINKER* akan membantu Anda memformulasikan ide-ide bagus, berpikir dengan cara-cara baru, dan sukses dalam karier dan pekerjaan Anda. Buku ini menjabarkan secara gamblang teknik-teknik seperti berpikir lateral, berpikir analitis, memecahkan masalah, memenangkan argumen, meningkatkan kinerja memori, hingga cara mewujudkan ide-ide Anda.

Sumber Foto :

Unsplash



Tarung Digital

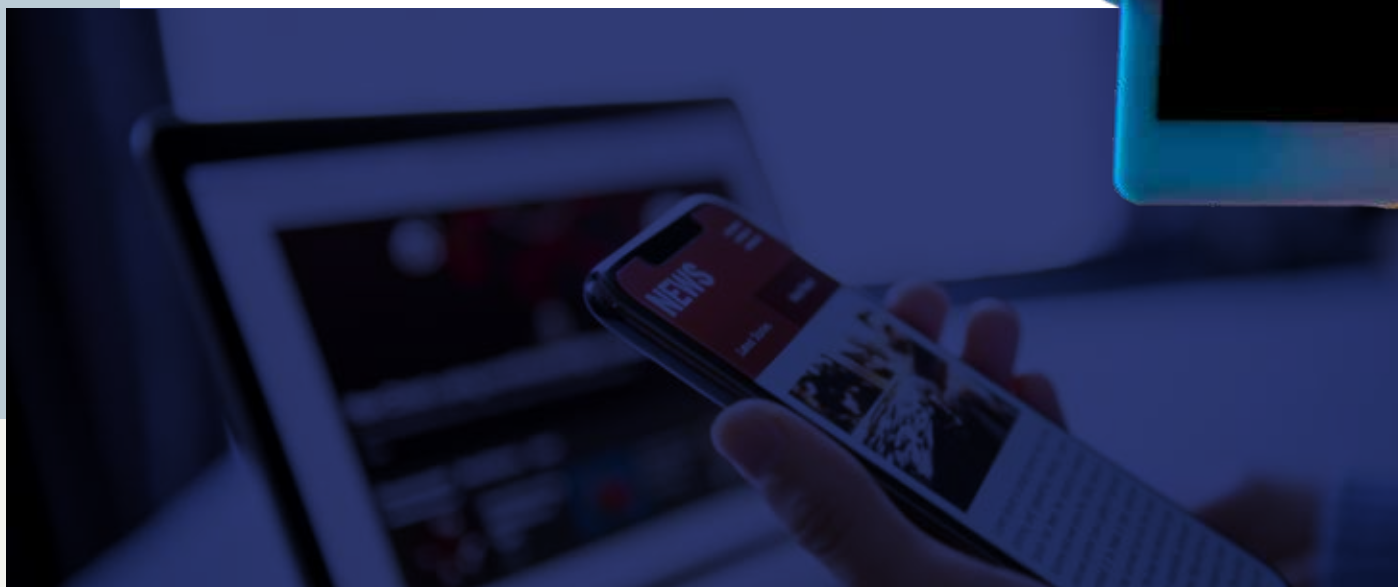
Dyah Purwaningrum

Koordinator Penyusunan Anggaran
Biro Perencanaan Kemkominfo

“Computational propaganda is best defined as the use of algorithms, automation, and human curation to purposefully distribute misleading information over social media.”

Masyarakat semakin terpolarisasi! Dalangnya adalah operasionalisasi algoritma media sosial pada ruang-ruang gema digital dimana ruang percakapan publik tercemari informasi palsu serta ujaran kebencian. Proses komunikasi dan perbincangan publik pada media sosial bukan lagi murni merupakan interaksi antarmanusia, melainkan juga interaksi antarmanusia dan mesin, bahkan mesin dan mesin. Masalah serius pun terjadi pada aras perlindungan privasi dan keamanan pribadi pengguna internet akibat kemampuan pengawasan perusahaan platform digital.

Buku setebal 368 halaman ini ditulis Agus Sudibyo merupakan anggota Dewan Pers (2019-2022) dan menjabat sebagai *Head of New Media Research Center* di Akademi Televisi Indonesia yang juga Penulis buku “Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan (2019)”. Di buku (kedua dari trilogi) ini Penulis mencoba menjelaskan secara kritis bagaimana latar belakang, pengertian, lingkup persoalan, dan dampak propaganda komputasional yang perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan teknis tetapi sekaligus politis.



Propaganda komputasional dipandang sebagai fenomena komputasi, politik, psikologi massa, sekaligus fenomena ekonomi. Akan tetapi dalam kerangka komunikasi politik, propaganda komputasional dijelaskan sebagai operasional algoritma kurasi, analisis big data, sistem otomatisasi, dan kecerdasan buatan untuk secara sengaja menghasilkan dan menyebarkan informasi yang menyesatkan melalui jaringan media sosial dan tidak menutup kemungkinan juga merembet ke media masa konvensional. *Ironically*, melalui propaganda komputasional unsur negara maupun non-negara berkesempatan untuk melakukan manipulasi atas arus informasi atau bahkan mewujudkan niat jahat kepada pihak lain tanpa merasa khawatir diketahui oleh publik.

Book Review



Tarung Digital:
Propaganda Komputasional di
Berbagai Negara

Penulis :
Agus Sudibyo

Penerbit :
Gramedia

Lazimnya, propaganda komputasional melibatkan satu atau lebih dari unsur seperti konten berita sampah atau informasi salah tentang politik dan kehidupan publik, pasukan troll yang memperluas jangkauan persebaran konten dan bot yang melakukan pengolahan dan pengiriman konten secara otomatis, akun-akun media sosial palsu yang dikendalikan secara terpusat. Baik *bot*, *troll*, situs berita palsu, politisi, media yang sangat partisan, media arus utama, *blogger* berpengaruh, pengguna aktif media sosial dan unsur pemerintah asing adalah para pelaku propaganda komputasional di berbagai negara.

Bot yang berasal dari kata robot, merupakan seperangkat kode algoritma program komputer atau perangkat lunak yang diciptakan untuk melakukan menyebarkan pesan dan membentuk percakapan politik secara otomatis. *Bot* memiliki tugas sederhana, berulang dan umumnya berbasis teks. Akan tetapi, *bot* juga difungsikan untuk menyebarkan berita palsu (*fake news*) selain ujaran-ujaran instan di media sosial. Sementara, *troll* digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keberadaan orang-orang yang sengaja memancing orang lain untuk memberikan respons emosional tentang masalah tertentu di jagat maya serta memengaruhi rantai pasukan berita dengan tujuan melahirkan kegaduhan dan menarik perhatian khalayak.

Efektivitas propaganda komputasional tergantung pada kombinasi kontribusi perangkat lunak *bot* dan *troll* manusia. Secara teknis, yang menonjol dalam konteks propaganda komputasional bukan hanya proses otomatisasi dan aplikasi teknologi kecerdasan buatan. Fakta bahwa ranah media baru secara umum belum terjangkau pengaturan undang-undang, telah menyediakan peluang besar untuk meraih popularitas dan pengaruh politik serta peluang meraih keuntungan ekonomi tanpa banyak hambatan regulasi sehingga membuat banyak sekali pihak terpacu memasuki bisnis penyedia berita palsu.

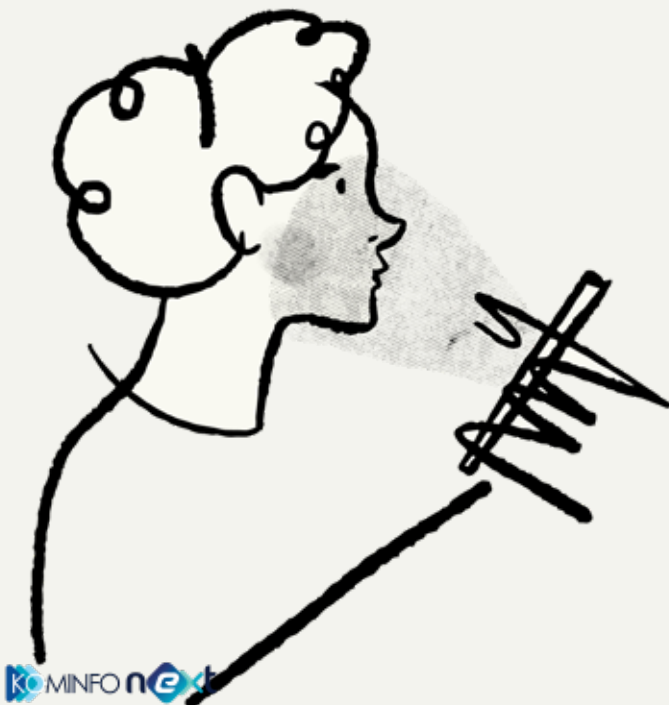
Propaganda komputasional memungkinkan penyebaran konten dalam jumlah besar secara cepat melalui jaringan media sosial dengan mengelabui pengguna untuk berpikir bahwa konten tersebut benar-benar berasal dari jaringan pertemanan antar-pemilik akun media sosial. Metode yang digunakan untuk menggerakkan mesin propaganda komputasional melalui sensor selektif, manipulasi peringkat pencairan, peretasan dan penyebaran hasil serta penyebaran disinformasi secara langsung di *platform* media sosial.

Hingga kini, belum ada sistem yang membantu pengguna memahami perbedaan antara *newsfeed* yang tersusun secara algoritmis atau yang dimanipulasi oleh akun-akun *bot* atau sistem yang secara paten mampu

membantu pengguna internet bisa membedakan antara informasi hasil rekayasa komputasional dan informasi yang benar-benar muncul dari interaksi antar-pengguna media sosial. *Newsfeed* adalah alat yang membantu pengguna media sosial menemukan informasi atau data yang sesuai dengan keyakinan atau minatnya sendiri. Walaupun bagi sebagian masyarakat, media sosial bukan satu-satunya sumber informasi. Bahkan bagi kelompok tertentu, media sosial merupakan sumber informasi yang perlu dihadapi dengan sikap kritis.

Prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab perlu menjadi fondasi bersama bagi semua pihak yang terkait dengan propaganda komputasional yang telah menjadi realitas global di mana propaganda komputasional telah berakar dan tersebar di mana-mana serta menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem informasi digital. Pelajaran penting dari hasil pelbagai penelitian adalah bahwa tidak ada platform media sosial yang benar-benar terbebas dari kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana propaganda komputasional. Walau tersedia lebih banyak platform media sosial, Facebook tetap menjadi platform utama untuk melancarkan operasi propaganda komputasional.

Walaupun teknologi digital tidak sepenuhnya buruk, tetapi akibat pengaruh buruk dari propaganda komputasional, perusahaan digital global harusnya merancang ulang platform media sosial (baru) guna memastikan dampak-dampak positif platform media sosial terhadap kehidupan politik. Perusahaan platform media sosial tidak seharusnya bersikap pasif atau pura-pura tidak tahu akan kejahatan yang telah terjadi, dan pemerintah pun perlu mengambil peran memerangi propaganda komputasional melalui jalur regulasi. Hindari kebijakan yang menekankan pengamanan berlebihan terhadap kehidupan masyarakat agar tidak mengancam segi-segi demokratisasi dan deliberasi teknologi digital.



Sebuah perusahaan strategi komunikasi dan propaganda komputasional yang berpusat di Inggris misalnya, *Strategic Communication Laboratories Group (SCL Group)*, memfokuskan diri pada penyediaan jasa penambangan dan analisis big data yang begitu identik dengan tindakan penyalahgunaan data psikografis pengguna media sosial untuk kebutuhan pembentukan dan penggiringan opini publik. SCL Group adalah perusahaan yang datang dan membuka kantor di Jakarta pada bulan-bulan penuh gejolak protes dan kerusuhan di beberapa kota Indonesia.

SCL Group disebut sebagai perusahaan konsultan yang melakukan survei opini publik, mengelola strategi komunikasi untuk beberapa politisi dan yang paling spesifik mengorganisasi unjuk rasa besar di sejumlah perguruan tinggi yang berujung kejatuhan Soeharto pada Mei 1998. Akan tetapi, dalam beberapa dokumen, tidak terdapat penjelasan secara spesifik untuk siapa awalnya SCL Group beroperasi di Indonesia walau ada pernyataan bahwa SCL Group mengelola kampanye Gus Dur dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Indonesia 1999.

Akan tetapi, jejak-jejak operasi SCL Group di Indonesia terjadi di era sebelum propaganda komputasional, dimana belum banyak pengguna internet di Indonesia dan propaganda politik saat itu masih bertumpu pada media cetak, televisi, radio dan kegiatan *off-air*. Sementara dalam Pilpres 2019, unsur propaganda komputasional teridentifikasi melalui penggunaan media sosial sebagai sarana propaganda, politisasi disinformasi dan ujaran kebencian, secara mobilisasi *bot* politik. Propaganda komputasional mewarnai Pemilu 2019 di mana setiap kubu kandidat mengerahkan pasukan siber untuk melakukan legitimasi diri sekaligus delegitimasi atas lawan politik.

Beberapa penelitian di 44 negara menunjukkan bahwa telah terjadi praktik pengerahan pasukan siber atau penggunaan media sosial oleh lembaga resmi pemerintah atau partai politik untuk memanipulasi opini publik. Lembaga resmi yang dimaksud mencakup kementerian komunikasi dan instansi militer. Penulis menegaskan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang memperlihatkan keterlibatan formal dan informal pemerintah dalam proyek propaganda

komputasional dimaksud karena Indonesia masih digerakkan oleh aktor partai politik dan kontraktor swasta dan masih bertumpu pada amplifikasi pesan dan penyebaran hoaks.

Tidak ada alasan untuk membenarkan kebohongan dan kepalsuan beredar di media sosial, apapun dampak yang ditimbulkan dan menjadikannya sarana baru untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karenanya media sosial lebih tepat diperlakukan sebagai ruang publik, bukan ruang privat. Sehingga tidak ada alasan untuk membenarkan praktik manipulasi opini masyarakat atau kampanye hitam melalui media sosial. Juga tidak ada permakluman atas perilaku-perilaku antisosial di media sosial terlepas dari fakta bahwa kebohongan, kepalsuan dan manipulasi tidak selalu efektif. Evaluasi kritis dan praktik propaganda komputasional tetap sangat relevan dan mendesak dilakukan dalam kehidupan publik.

In my humble opinion, buku ini memang lebih menekankan propaganda komputasional sebagai fenomena komunikasi politik, bukan eksplorasi fenomena propaganda berbasis komputer, dimana terlalu banyak pesan-pesan politik bertebaran di dalamnya. *It feels like* arti kata propaganda itu sendiri yang menurut KBBI memiliki arti "paham/pendapat yang (entah) benar atau salah dan ditujukan untuk meyakinkan orang agar menganut suatu sikap/arah tindakan tertentu". Apa gerangan yang akan Penulis sajikan pada buku terakhir dari trilogi literasi digital nanti?



TEKNO LOGI & GAD GET

Teknologi
Untuk
Lansia



Indonesia memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) setiap tanggal 29 Mei 2021. Pada hari tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Peringatan HLUN mulai diperingati, ketika Presiden Soeharto menetapkan tanggal 29 Mei sebagai HLUN di Kota Semarang.

Penentuan HLUN pada tanggal 29 Mei ternyata memiliki sejarah tersendiri. Pada tanggal tersebut, terjadi peristiwa penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia di mana Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat,

salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang saat itu berusia 66 tahun, ditunjuk untuk menjadi pemimpin sidang pertama BPUPKI. Sehingga, dipilihnya tanggal tersebut sebagai HLUN adalah untuk menghormati jasa Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat.

Dalam keterkaitannya dengan kebutuhan orang lanjut usia, beberapa perusahaan digital di dunia mengembangkan *gadget* maupun aplikasi yang bisa membantu orang lanjut usia dalam menjalani aktivitas mereka. Yuk, Sobatkom kita simak *gadget* dan aplikasi apa saja.

Sumber Foto : Unsplash

WalkJoy

Sebuah perusahaan startup bidang Kesehatan di Amerika mengembangkan *gadget* yang digunakan **untuk membantu lansia agar tetap bisa berjalan – bahkan berlari dengan nyaman**. Alat ini dipasang di lutut untuk kemudian akan membantu mengirimkan sinyal ke otak, ketika kaki mulai berjalan. Sistem saraf otak akan bekerja bersamaan dengan sinyal yang dipancarkan alat ini, sehingga keseimbangan kaki bisa lebih terjaga.



PocketFinder

Beberapa lansia mengalami penurunan daya ingat yang menyebabkan mereka akan mudah tersesat ketika berada di tempat baru maupun di tengah keramaian. PocketFinder akan membantu anda dalam mendeteksi lokasi dengan menggunakan beberapa teknologi sekaligus, yaitu GPS/A-GPS, Wi-Fi Google Touch Triangulation, Cell-ID, dan Google Premiere Mapping.



Aplikasi ini akan mencatat lokasi pengguna setiap 60 detik, bahkan untuk PocketFinder+ bisa melakukan update lokasi setiap 10 detik.

Jam Pintar untuk Lansia

Jam tangan merupakan alat yang telah hadir mengiringi perkembangan peradaban manusia. Dalam perkembangannya, alat berbentuk mungil yang melingkar di pergelangan tangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu saja, tetapi juga penanda strata sosial seseorang, mengukur jarak, denyut jantung, jumlah kalori ketika berolahraga, hingga mengontrol fungsi perangkat pintar lainnya. Sehingga, saat ini, jam tangan telah menjadi aksesoris wajib bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Melihat hal ini, perusahaan Lively membuat *gadget* berupa jam tangan pintar bagi kaum lansia.



Jam tangan ini memiliki fitur untuk pengingat minum obat dan panggilan darurat untuk kondisi bahaya. Cukup dengan menekan satu tombol saja, maka jam tangan akan langsung akan terhubung ke pusat layanan darurat.

Sumber Foto : Unsplash

Kominfopedia: BTS



(1) Tower 4 kaki / Rectangular Tower



(2) Tower 3 kaki / Triangle Tower



(3) Tower 1 kaki / Pole

Halo Sobatkom!

Kalau saat ini perhatian dunia sedang terpusat pada BTS - grup *boyband* asal Korea Selatan, Kementerian Kominfo juga punya BTS yang tidak kalah pentingnya bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. BTS adalah singkatan dari *Base Transceiver Station* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut stasiun pemancar. BTS menjadi salah satu infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi.

BTS yang juga memiliki nama lain *Base Station (BS)* dan *Radio Base Station (RBS)*, merupakan stasiun pemancar yang memiliki tugas utama untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat telekomunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan *gadget* sejenis lainnya. Sinyal radio yang masuk ke perangkat, akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk kemudian menjadi sebuah pesan atau data.

Banyak orang yang sering salah kaprah dalam mengartikan BTS. Umumnya mereka menganggap tower BTS adalah BTS itu sendiri. Faktanya adalah tower BTS merupakan salah satu komponen dari perangkat BTS. Tower sendiri adalah suatu menara yang dibuat dari besi atau pipa. Dalam pembuatan tower BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi empat, kaki segitiga, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja. Umumnya tower BTS memiliki panjang antara 40 hingga 75 meter. Tiap daerah memiliki panjang tower BTS yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi geografis serta luas jangkauan jaringan yang ditargetkan.

Macam-macam Tower BTS

Seperti yang sudah disinggung pada paragraf sebelumnya bahwa tower BTS memiliki berbagai varian yang berbeda. Terdapat tiga macam tower BTS yang sering dijumpai di Indonesia yaitu tower empat kaki, tower tiga kaki dan tower satu kaki. Nah berikut ini akan dijelaskan lebih detail mengenai ketiga macam tower tersebut.

1. Tower 4 kaki / Rectangular Tower

Sesuai dengan namanya, tower ini berbentuk segi empat dan memiliki empat kaki. Karena konstruksinya yang kokoh, tower ini diharapkan memiliki kekuatan yang optimal untuk menghindari kemungkinan roboh. Tingginya kurang lebih 42 meter serta mampu mencakup banyak antena dan radio. Tipe tower ini biasanya digunakan oleh perusahaan telekomunikasi terkemuka seperti Telkom, Indosat, XL, dll mengingat harganya yang cukup fantastis yakni mencapai 650 juta-1 milyar rupiah.

2. Tower 3 kaki/ Triangle Tower

Menara segitiga ini terdiri dari 3 pondasi tower. Tiap pondasi disusun dalam beberapa potongan yang berkisar 4-5 meter. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misal roboh sebaiknya tower ini memakai besi yang berdiameter diatas 2 sentimeter. Rata-rata tower jenis ini tingginya berkisar antara 40 meter dan maksimal 60 meter. Makin pendek tower tingkat keamanannya lebih

tinggi. Kelebihan dari menara ini adalah komponennya lebih ringan sehingga menghemat biaya produksi dan pengangkutan.

3. Tower 1 kaki/Pole

Sebenarnya tower jenis ini tidak direkomendasikan karena banyak kekurangannya. Dalam penerimaan sinyal tergolong tidak stabil, mudah goyang, dan mengganggu sistem koneksi data yang berakibat pencarian di komputer terjadi secara terus-menerus. Tower ini ada dua macam, yang pertama dibuat dengan pipa/plat baja tanpa *spanner* dengan diameter 40 cm hingga 50 cm dan rata-rata tingginya 42 meter. Kedua, tower yang dibuat dengan *spanner* yang menurut ahli pembuatannya tidak bisa melebihi 20 meter.

Komponen pada Tower BTS

Selain mengetahui macam-macam tower BTS, Sobatkom juga perlu tahu mengenai komponen-komponen apa saja yang melekat pada tower BTS. tercatat terdapat sembilan komponen penting yang harus dimiliki oleh tower BTS. Berikut informasi lebih lengkapnya :

1. Antena Sectoral : antena ini letaknya ada di bagian paling atas dan berbentuk persegi panjang. Fungsinya adalah menghubungkan BTS dengan alat komunikasi misal *handphone*. Antena ini ada 2 macam yaitu *mono type* yang dipakai di daerah pedesaan dan pinggiran. Yang kedua adalah *dual type* yang lokasinya biasanya di daerah perkotaan.

2. Antena Microwave : saat kita menjumpai tower BTS pasti ada satu bagian yang tampak seperti gendang rebana, itulah yang dimaksud antena *microwave*. Fungsinya menerima dan memancarkan gelombang radio dari BTS ke BSC atau dari BTS ke BTS.

3. Shelter : *shelter* ini berfungsi untuk menyimpan peralatan, biasanya ada di samping tower.

4. Microwave System : sistem ini dibagi dua yakni *indoor* unit dan *outdoor* unit. Keduanya terhubung melalui kabel *coaxial*. *Indoor* unit sesuai namanya berada di dalam shelter sedangkan *outdoor* unit menempel pada antena *microwave*.

5. Rectifier System : sistem ini bertugas untuk mengubah tegangan dari PLN 220/380 volt *alternating current* menjadi tegangan *direct current* untuk dikirim ke BTS.

6. Baterai : di dalam BTS terdapat baterai yang gunanya sebagai cadangan *power* apabila terjadi pemadaman listrik. Ketahanan baterai mencapai 3-4 jam.

7. Tower sentral : adalah tower itu sendiri serta sistem pertanahan yang mengaturnya. Fungsinya sebagai media untuk menginstal antena-antena dan *feeder*.

8. Feeder : merupakan kabel besar yang dijadikan media rambat gelombang radio antara BTS dengan antena sector.

9. Dynasphere : merupakan alat yang digunakan untuk melindungi tower dari sambaran petir.

Demikian rangkaian informasi yang menjelaskan tentang BTS. Informasi tersebut berupa pengertian, cara kerja, macam dan juga komponen yang harus ada pada sebuah BTS. Semoga setelah membaca artikel ini Sobatkom akan lebih memahami tentang kegunaan sebenarnya dari tower BTS.



Sumber : dikutip sepenuhnya dari situs baktikominfo.id
 Sumber gambar : <https://www.teknoidot.com/tower-telekomunikasi-jenis-dan-perangkat-pendukungnya/>
<http://gladyzarizona.blogspot.com/>
<https://hbtengyang.en.made-in-china.com/>
<https://telehouse-eng.com/>

Pembangunan BTS 4G

Dorong Efektivitas dan Produktivitas Masyarakat

Infrastruktur telekomunikasi dan internet adalah salah satu pilar utama percepatan transformasi digital nasional, dengan selalu memberikan perhatian dan pembangunan pada daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.

“

Kita berharap pembangunan BTS 4G ini segera dapat mendorong efektivitas dan produktivitas masyarakat dengan melakukan aktivitas secara digital.

Johnny G. Plate, Menkominfo RI

saat peletakkan batu pertama atau ground breaking pembangunan BTS (Base Transceiver Station) 4G di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, dan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (22/04/2021).

Bangun BTS 4G Berbasis Wilayah, Target Selesai Tahun 2022

BTS 4G

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyelesaian pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk sinyal 4G di seluruh Indonesia pada tahun 2022.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan selama ini pemerintah membangun infrastruktur TIK berbasis pada jaringan atau *network*. Untuk mempercepat pemerataan di seluruh Indonesia, pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di *upstream* namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah.

"Jadi pendekatannya sangat teritorial, untuk itu telah dilakukan analisis di mana saja di Indonesia ini berbasis desa atau kelurahan, titik-titik yang belum terjangkau sinyal yang secara umum dikenal sebagai *blank spot*," ujarnya dalam Ngobrol Santai Bareng Menkominfo, di InterContinental Bali Resort, Denpasar Bali, Jumat (26/03/2021).

Menteri Johnny memaparkan khusus di wilayah 3T terdapat total 9.113 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut sudah dibangun BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan. Sedangkan sisanya sebanyak

7.904 telah diprogramkan pada tahun 2021 dan 2022. Sementara untuk wilayah Non-3T berjumlah 3.435 desa dan kelurahan yang juga saat ini sedang disiapkan oleh operator seluler.

"Dalam rangka membangun di *the last mile* atau di titik akhir infrastruktur TIK untuk menjangkau wilayah desa dan kelurahan itu, dilakukanlah rapat (*Kick-off Meeting*) di Denpasar, Bali mulai kemarin untuk meneruskan penandatanganan kontrak payung pembangunan BTS di 7.904 desa yang dilaksanakan di hadapan Presiden di Istana Negara," tandasnya.

Menurut Menteri Kominfo, melalui *Kick-off Meeting* bersama konsorsium, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo segera menyelesaikan layanan sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau.

"Sehingga dilakukan usaha pembangunan infrastruktur untuk memastikan sinyal di wilayah terdepan bisa dihasilkan, yang dibagi dalam dua bagian yang dikenal dengan wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dilakukan oleh BAKTI Kominfo, dan wilayah Non-3T yang akan dikerjakan beramai-ramai bersama operator seluler," jelasnya.

Mitigasi Risiko

Pembagian berdasar teritorial juga menjadi dasar untuk kerja sama dengan pemenang lelang Paket BTS 4G. Menurutnya, pembicaraan dan penjelasan dalam *Kick-off Meeting* merupakan awal dari satu mekanisme implementasi kontrak dengan objektif, yang diharapkan sasaran dan tujuan dari pembangunan infrastruktur BTS 4G berjalan lancar sesuai jadwal dan jumlah yang disepakati.

"Yang pertama pastinya pesan-pesan penyelenggara atau yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, ada 3 grup perusahaan yang terbagi dalam 5 wilayah kerja yang kemudian didetailkan menjadi 11 area di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur," ujar Menteri Johnny.

Menkominfo menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS 4G nantinya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 4.200 BTS untuk 4200 desa dan kelurahan akan dibangun pada tahun 2021.

“Dan sisanya 3.700 dibangun di tahun 2022, sesuai ketersediaan pembiayaan melalui mekanisme *blended financing* atau bauran pembiayaan, ada komponen rupiah murni, komponen PNBK sektor Kominfo dan komponen *Universal Service Obligation*,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan dalam *Kick-off Meeting* berlangsung pembahasan dan penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing konsorsium melalui beberapa penekanan.

“Penekanan yang pertama adalah jadwal kerja sudah diatur seperti apa, yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk memungkinkan transfer teknologi khususnya tenaga-tenaga lokal baik dilatih di dalam negeri, maupun dilatih di luar negeri di tempat perusahaan-perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Menurut Menkominfo masalah krusial yang dihadapi saat ini salah satunya adalah mitigasi risiko yang ditimbulkan. Diantaranya, memastikan tersedianya lahan. Ketersediaan lahan merupakan proses perizinan awal di daerah yang nantinya harus menjadi perhatian bersama.

Oleh karena itu, Menteri Johnny berharap BAKTI dan konsorsium harus kerjasama dengan baik, termasuk juga perkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan masalah krusial yang kedua proses perijinan. Mengingat target penyelesaian dikerjakan dalam jadwal yang ketat, hal itu diharapkan proses perizinan juga bisa dilakukan dengan baik dan cepat.





Transformasi Digital

Solusi Strategis untuk Kompetitif

Tak hanya konektivitas fisik, konektivitas digital juga diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkokoh persatuan bangsa.

Pembangunan infrastruktur peningkatan konektivitas fisik yang menjadi program utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan harus diiringi dengan pembangunan konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara. Tak hanya untuk kepentingan ekonomi semata, konektivitas baik fisik maupun digital tersebut juga sekaligus akan merangkai negara Indonesia yang amat besar.

Saat meluncurkan program Konektivitas Digital 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada februari lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konektivitas fisik dan digital tersebut juga sangat diperlukan untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkokoh persatuan bangsa.

“Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar,” ujarnya.

Pembangunan konektivitas digital tersebut dan tentunya penyiapan talenta digital dalam rangka mewujudkan transformasi digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Di antaranya ialah penyediaan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah (SATRIA), pembangunan menara-menara telekomunikasi hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, program beasiswa talenta digital, dan Gerakan Nasional Literasi Digital.

Atas hal tersebut, Kepala Negara mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di mana manfaat yang akan dirasakan dari semua upaya tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini. Sebab, menurutnya, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa kemajuan bagi Indonesia.

“Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun, juga sangat penting untuk tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” kata Presiden.

Presiden menjelaskan, transformasi digital tersebut dalam implementasinya juga harus mewujudkan kedaulatan dan kemandirian digital yang merupakan prinsip penting transformasi digital Indonesia. Bentuk transformasi tersebut haruslah mendorong penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), meningkatkan pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa.

“Saya berharap agar program Konektivitas Digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi, pola pikir, kesempatan bisnis global, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia Maju,” tandasnya.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.



“ Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan.

”

Antisipasi Perubahan, Presiden Berikan 5 Arah Soal Perencanaan Transformasi Digital

Presiden Joko Widodo saat memimpin Ratas di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun *next* pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke *online*.

"Perubahan seperti ini perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang," tutur Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Perencanaan Transformasi Digital, Senin, 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk antisipasi hal itu, Presiden memberikan beberapa arahan secara lengkap sebagai berikut:

Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.

"Saya kira kemarin sudah bicara dengan Kominfo mengenai ini. Kemudian, percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik," ujar Presiden.

Kedua, persiapkan betul *roadmap* transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.

"Jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah," Presiden mengingatkan.

Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.

Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital.

"Ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan, ini perlu betul-betul sebuah persiapan," ungkap Presiden. Kepala Negara juga menambahkan bahwa kurang lebih 600.000 per tahun kebutuhan SDM sehingga Indonesia bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital.

Kelima, Presiden minta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga sampaikan survei lembaga IMD *World Digital Competitiveness* pada 2019 Indonesia masih di peringkat 56 dari 63 negara. "Ini memang kita di bawah sekali. Lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita di ASEAN, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, Singapura di posisi nomor 2," tandas Presiden.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOMINFO TERUS BANGUN BTS 4G DI DAERAH 3T

Infrastruktur telekomunikasi dan Internet adalah salah satu pilar utama percepatan transformasi digital nasional. Dengan selalu memberikan perhatian dan pembangunan pada daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal, kita berharap pembangunan BTS 4G ini segera dapat mendorong efektifitas dan produktifitas masyarakat dengan melakukan aktivitas secara digital.”

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi & Informatika RI
Natuna, 22 April 2021



@kemkominfo



@kemenkominfo



Kemkominfo TV

BTS 4G

Supaya Indonesia Terkoneksi

Dalam setiap era kepemimpinan nasional dari belahan negara manapun, hampir bisa dipastikan arah dan kebijakan yang diprioritaskan adalah hasil telaah panjang dari bagaimana cara pandang melihat dunia yang terus mengalami perubahan; baik perubahan sikap, perilaku, adaptasi lingkungan, hingga perubahan-perubahan yang mendorong setiap orang bertransformasi ke dalam ruang dan waktu yang bergerak begitu cepat.

Berawal dari Arahan Presiden

Komunikasi dan teknologi. Adalah dua aspek yang mengubah cara pandang dan pola hidup manusia. Bahkan, di setiap perubahan zaman dan bagaimana kelanjutan hidup dan kehidupan manusia kelak, komunikasi dan teknologi tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dalam hal ini, teknologi telah mengikat erat pola komunikasi manusia untuk mengikuti arus perkembangannya.

Hal yang menarik diulas oleh Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam buku berjudul *The New Digital Age* atau *Era Baru Digital* (2014), pada pembahasan Masa Depan Revolusi. Eric Schmidt dan Jared Cohen meyakini bahwa di sepanjang sejarah, teknologi pada zamannya turut merangsang dan membentuk cara revolusi berkembang, tapi di level mendasar semua yang berhasil sukses memiliki faktor-faktor yang sama, seperti struktur prasarana, dukungan dari luar, dan kepaduan budaya – Hal.126.

Eric Schmidt dan Jared Cohen memang secara gamblang menyoal revolusi secara umum, namun aspek digital menjadi salah satu pendekatan yang kemudian digunakan. Hal ini tentunya dapat kita tarik ke era revolusi industri 4.0 yang terus digaungkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Maka, sudah saatnya Indonesia memiliki perangkat teknologi internet terbaru juga termutakhir, supaya masyarakat dari seluruh pelosok negeri terkoneksi satu sama lainnya. Ketika persoalan konektivitas nantinya telah menjangkau keseluruhan masyarakat tanpa batas, di saat yang sama Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki turut mempengaruhi dinamika global.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 dalam Sidang Kabinet, memberikan arahan terkait percepatan transformasi digital. Dalam pelaksanaannya, Presiden menugaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika mewujudkan arahan tersebut yang dispesifikasikan dalam 5 aspek. Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo kemudian menjawab 5 arahan Presiden dengan menyusun Peta Jalan atau Roadmap Indonesia Digital.

Untuk mengulas lebih dalam terkait arahan Presiden, Tim Majalah Kominfo Next berkesempatan melakukan wawancara secara langsung bersama Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Latif. BAKTI merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Kominfo yang salah satu tugas pentingnya adalah menyelesaikan infrastruktur telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Ada 5 arahan Bapak Presiden. Pertama, terkait percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk di dalamnya persiapan atau penyediaan sinyal internet. Kedua, persiapan terkait peta jalan transformasi digital. Ketiga, percepatan Integrasi Pusat Data Nasional. Keempat, terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia atau talenta digital, dan kelima, regulasi dan skema pembiayaannya. Jadi lima arahan itulah yang menjadi perhatian Bapak Presiden yang disampaikan di Istana Merdeka, 3 Agustus 2020,” ujar Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif.

Salah satu infrastruktur TIK yang menjadi penopang dan syarat Indonesia terkoneksi adalah pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk layanan sinyal 4G. Pemerintah sendiri memiliki komitmen yang kuat agar desa/kelurahan di seluruh Indonesia dengan total sebanyak 83.820 desa/kelurahan harus dihubungkan dengan layanan sinyal 4G. Oleh karena itu, BAKTI Kementerian Kominfo menargetkan penyelesaian pembangunan kebutuhan telekomunikasi itu setidaknya hingga akhir tahun 2022 nanti.

Sebagai bagian dari program Universal Service Obligation (USO), BTS 4G lebih difokuskan pembangunannya di daerah blankspot atau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Program ini termasuk dalam Rencana Strategis Kementerian Kominfo sejak periode 2015-2019, kemudian di awal pembangunan BAKTI Kementerian Kominfo telah menuntaskan konektivitas digital dengan menghadirkan 21 BTS yang telah *on air* hingga Oktober 2016. Pada periode yang sama, Kementerian Kominfo terus menargetkan misi pembangunannya untuk menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, selama periode tersebut pemerintah telah berhasil menyediakan sebanyak 575 BTS 4G di sebagian wilayah 3T di Indonesia. Apakah sudah cukup? Tentu saja belum.

Pada periode 2019-2024, BAKTI Kementerian Kominfo melakukan akselerasi dan percepatan pembangunan yang tidak tanggung-tanggung. Jika target pembangunan dikerjakan berdasarkan rencana sebelumnya, atau dalam hal ini proses pembangunannya dilakukan secara biasa-biasa saja, maka target keseluruhannya baru bisa diselesaikan tahun 2032. Namun, mengingat arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital, Kementerian Kominfo menargetkan BTS 4G untuk seluruh desa dan kelurahan di Indonesia akan rampung pada akhir tahun 2022 nanti, atau dipastikan 10 tahun lebih cepat dari rencana sebelumnya.

Ground Breaking BTS 4G



Komitmen menyelesaikan target pembangunan BTS 4G itu ditandai dengan dilakukannya *groundbreaking* atau peletakan batu pertama oleh Menteri Koinfo Johnny G. Plate di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 22 April 2021 lalu.



Sisi lain yang menarik perhatian masyarakat melihat dimulainya *groundbreaking* BTS 4G tidak saja menyoal penanda pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal lain yang penting ialah melalui pemenuhan kebutuhan BTS 4G sendiri turut menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya pada wilayah terluar NKRI. Menteri Koinfo Johnny G. Plate menyebutkan upaya tersebut merupakan perhatian serius pemerintah.

"Infrastruktur digital adalah pokok dan penting dalam menjaga kedaulatan negara, semisal melalui telekomunikasi dan informasi terkait keamanan perairan laut," kata Menteri Koinfo dalam acara *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan BTS 4G di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021).

Sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital, Kementerian Koinfo akan terus melakukan terobosan dengan semangat kolaborasi yang tinggi antar berbagai pihak, termasuk dalam hal ini operator seluler yang merupakan mitra strategis Koinfo.

"*Groundbreaking* ini menandakan sebuah semangat, sebuah motivasi Koinfo menyelesaikan tugas utama yaitu terkait dengan arahan Bapak Presiden yang pertama penuntasan infrastruktur digital, membangun BTS untuk melayani layanan 4G seluler yang mencapai sebanyak 7.904 lokasi, yang akan digelar dalam periode tahun 2021 Hingga Akhir Tahun 2022 di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terpencil)," kata Dirut BAKTI Koinfo.

Jumlah pembangunan BTS 4G di wilayah 3T tersebut juga akan melengkapi secara bersama-sama pembangunan di wilayah non 3T yang menjadi tugas dari operator seluler, yakni sebanyak 3.435. "Sehingga harapannya, di akhir 2022 seluruh desa di Indonesia bisa hadir layanan 4G digital yang menyiapkan layanan internet," jelasnya.

Selama proses pembangunan berlangsung, salah satu persiapan awal yang dilakukan adalah



mengantongi kerja sama dengan operator seluler sebagai mitra kerja Kementerian Kominfo. Sebab, BTS 4G hadir di pertengahan atau perkampungan penduduk desa. Perhatian serius diberikan kepada masyarakat di pelosok mengingat pentingnya perkembangan era digital yang juga mengharuskan setiap desa memiliki perangkat atau jaminan akses internet, termasuk dalam hal ini masyarakat di pedesaan mampu mengoperasikan sistem operasional dari akses internet itu sendiri.

Akan tetapi mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu tidak mudah dalam membangun infrastruktur, seperti masyarakat yang bermukim di wilayah pegunungan. Mau tidak mau, alat-alat berat harus dibawa ke daerah pegunungan dengan tantangan yang tidak mudah. Meskipun dampak yang dirasakan masyarakat tidak saja memanfaatkan akses internet, namun kadang dampak lain yang tidak diinginkan sering terjadi pencurian oleh penduduk setempat yang seyogyanya tidak memahami jenis alat apa yang dicuri.

“Inilah kenapa kita tempatkan di pertengahan, perkampungan di desa-desa. Nah, kesiapannya yaitu diperlukan membangun tower dengan variasi kurang lebih 18 meter hingga 30 sampai 40 meter untuk menjangkau sekitar 2 km atau 3 km radius di desa tersebut. Harapannya, pergerakan penduduk entah itu mereka melakukan pertanian, perkebunan bahkan untuk nelayan masih bisa terjangkau dengan lokasi radius sampai dengan 3 km,” ujar Dirut BAKTI Kominfo.





Penerapan KSO

Tidak terhenti pada *groundbreaking*, menyadari pentingnya kerja sama dan kerja kolaborasi, Kementerian Kominfo juga telah menerapkan kerja sama operasi atau KSO bersama perusahaan operator seluler. Dirut BAKTI Anang Latif menyatakan bahwa perusahaan operator seluler yang notabene memiliki lisensi yang kuat di Indonesia perlu terus digandeng melalui KSO tersebut, sebagai langkah konkrit guna memastikan penuntasan sinyal 4G di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T.

“Seleksi penyedia layanan seluler untuk BTS 4G di wilayah 3T ini tidak kalah pentingnya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Kualitas layanan seluler yang menjangkau hingga pelosok nusantara menjadi ujung tombak hajat besar percepatan transformasi digital nasional,” kata Dirut BAKTI.

Proses penetapan KSO merupakan bagian dari tugas Kementerian Kominfo untuk memastikan hak masyarakat Indonesia mendapatkan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan terjamin. Hal itulah yang kemudian menjadi komitmen besar agar dapat dipastikan tidak ada satu masyarakat pun yang tertinggal ketika proses transformasi digital berjalan.

Untuk diketahui, seleksi KSO sendiri dilakukan dengan mekanisme seleksi yang akuntabel dan transparan dengan

harapan Kementerian Kominfo mendapatkan mitra yang andal serta kompeten. Oleh karenanya, skema yang diterapkan adalah BAKTI Kominfo bertanggung jawab melakukan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, termasuk menyediakan lahan. Sementara, mitra operator seluler bertanggung jawab menyediakan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan.

Bahkan, ditegaskan oleh Dirut BAKTI Kominfo bahwa penyelenggaraan KSO memiliki dasar hukum pelaksanaan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2020



Inilah bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan tanpa terkecuali, menyediakan pelayanan yang merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia

tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dan Peraturan Direktur Utama BAKTI Kominfo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset BAKTI Kominfo dan Aset Pihak Lain di Lingkungan BLU BAKTI Kominfo.

Dengan demikian, pembangunan BTS 4G di 7.904 lokasi 3T akan menggenapi upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan digital, terutama sebagian besar ada di wilayah Indonesia timur. Setidaknya, 5.204 dari total lokasi berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau sekitar 65% pekerjaannya. "Inilah bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan tanpa terkecuali, menyediakan pelayanan yang

merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia," tegas Dirut BAKTI Kominfo.

Membangun konektivitas digital di Indonesia memang bukan hal yang mudah, mengingat ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote disadari penuh membutuhkan waktu tidak juga singkat. Namun satu hal yang juga kita sadari bersama bahwa, Indonesia sudah tertinggal jauh dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara dalam hal kebutuhan di sektor digital. Untuk itulah, akselerasi percepatan transformasi digital adalah satu-satunya jalan agar Indonesia terkoneksi, agar masyarakat di seluruh wilayah Tanah Air ikut merasakan penggunaan internet yang merata, yang adil dan makmur. Kita bersama-sama menantikan kejayaan Indonesia terkoneksi dan semakin maju di akhir tahun 2022 nanti.



Legenda 1000 Candi: Cerita di Balik BTS 4G untuk Indonesia

Nusantara dahulu dan Indonesia kini. Dua nama yang saling terikat dan sarat sejarah panjang peradaban manusia itu kita namai sebagai Ibu Pertiwi. Dari rahim Ibu Pertiwi pula tercipta sejarah masa lalu, seperti cerita-cerita legendaris yang sebagian di antaranya tidak asing lagi bagi kita.

Cerita tentang legenda 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso, misalnya, sang pemimpin Kerajaan Prambanan kala itu. Kisah ini bisa menjadi salah satu cerita menarik untuk kita refleksikan di Indonesia saat ini dalam konteks permasalahan dan kesenjangan sosial yang harus diselesaikan. Terlepas dari keangkuhan dan cara memimpin Bandung Bondowoso, ada pesan yang tersirat tentang bagaimana membangun negeri atas dasar cinta dan komitmen.

Cerita rakyat itu dikisahkan, Bandung Bondowoso diberi dua syarat yang tidak mudah oleh permaisuri cantik Roro Jonggrang, putri Prabu Baka, seorang Raja yang mati di medan perang oleh pasukan Bandung Bondowoso. Singkat cerita, meskipun Bandung Bondowoso akhirnya tahu Roro Jonggrang adalah putri dari raja Prabu Baka,

namun ia tidak bisa berbohong telah jatuh hati pada Roro Jonggrang. Tantangan yang harus dilewati pun tidaklah mudah. Syarat pertama dari Roro Jonggrang adalah membuat sumur Jalatunda dalam waktu semalam. Meskipun berhasil melewati tantangan itu, ia menyadari bahwa dirinya masuk dalam jebakan putri sang raja. Perjuangannya belum usai, Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi yang juga diberikan waktu hanya dalam satu malam. Dengan semangat membara, permintaan Roro Jonggrang pun akhirnya ia penuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan berhasil. Namun kembali lagi, ia terjebak dalam permainan Roro Jonggrang. Candi yang dibangun itu kini dikenal sebagai Candi Prambanan.

Ada hikmah yang bisa kita petik di balik cerita rakyat 1000 candi di atas. Bahwa semangat yang berapi-api dari Bandung Bondowoso membangun 1000 candi dalam semalam, tentu atas dasar cintanya kepada Roro Jonggrang. Apapun akan dilakukan, meskipun 1000 candi dibangun dalam kurun waktu semalam itu tidak bisa kita terima secara akal sehat. Demikian halnya ketika masyarakat Indonesia saat ini tengah mengetahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan akselerasi transformasi digital secara besar-besaran. Seperti membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Tanah Air, salah satunya Base Transceiver Station atau BTS berbasis jaringan 4G.

Jika Bandung Bondowoso berhasil membangun 1000 candi dalam semalam, maka Kementerian Kominfo bersama mitra kerjanya akan membangun jaringan BTS 4G untuk 83.820 desa dan kelurahan (Data Badan Pusat Statistik – 2021), di seluruh Indonesia dengan target 10 tahun lebih cepat. Ya, jika menggunakan Rencana Strategis sebelumnya, konektivitas internet yang menjangkau seluruh Indonesia sejatinya akan rampung di tahun 2032. Namun, berkat semangat kerja, semangat kolaborasi bangun negeri, dan atas dasar cinta kepada rakyat Indonesia, Kementerian Kominfo memajukan target pembangunan itu pada akhir tahun 2022 nanti. Artinya bahwa, transformasi digital nasional mendorong konektivitas digital maju 10 tahun lebih cepat untuk menjangkau masyarakat dari ujung Sabang sampai Merauke, dari ujung Mianga sampai Pulau Rote.

Kontrak Payung 5 Paket

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai Badan Layanan Umum di Kementerian Kominfo, telah menyelesaikan penandatanganan kontrak payung 5 paket BTS 4G yang masing-masing paket dipilih berdasarkan wilayah kepulauan. Dirut BAKTI Kominfo Anang Latif menyampaikan, hal menarik dari BLU BAKTI adalah memiliki banyak model pengadaan yang bisa diterapkan karena fleksibilitas yang dimiliki. Salah satu model pengadaan yang diterapkan adalah dengan menandatangani kontrak payung.

“Kontrak payung ini untuk jaminan kepada para penyedia atau para mitranya BAKTI untuk menyiapkan infrastruktur hingga mengoperasikannya sampai akhir tahun 2024. Nah, inilah kontrak payung sebagai kontrak BAKTI dengan mitranya mencakup 5 paket area,” ujar Dirut BAKTI.

Untuk Paket 1 menjangkau wilayah Sumatera, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Paket 2 mencakup Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Paket 3 untuk wilayah Papua Barat dan sebagian Papua, serta

Paket 4 dan Paket 5 menjangkau Papua bagian tengah dan Papua bagian timur. Dari 5 paket tersebut, 65% di antaranya difokuskan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut menekankan pembangunan akses BTS 4G diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur.

Terlepas dari upaya bersama menyelesaikan 5 Paket Kontrak Payung itu, Dirut BAKTI Kominfo punya pengalaman tersendiri menyoal pembangunan infrastruktur TIK di wilayah Timur, khususnya Papua dan Papua Barat. Secara geografis, tingkat kesulitan yang paling besar dirasakan ketika distribusi alat dan perangkat pendukung di wilayah pegunungan.

“Papua ini dilihat dari sebaran demografinya, sebaran penduduknya berbeda dengan kita-kita yang ada di pulau Jawa, tersebar dan terpisah antara kampung satu dengan kampung lainnya, bahkan kadang-kadang dipisahkan bukit dan pegunungan. Dengan terpencarnya ini, tentu membuat jaringan yang perlu dibangun termasuk pembangunan tower harus tersebar dengan jumlah yang cukup banyak,” katanya.

Melihat medan yang tidak mudah dilewati, operator seluler yang seharusnya secara komersial harus menyediakan akses internet kepada masyarakat terpaksa tidak bisa membangun. Penyebabnya mengingat jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk menjangkau perkampungan tidak sedikit. Di sisi lain, jumlah penduduk masyarakat di pelosok juga tidak banyak dibanding masyarakat kota, juga hambatan lainnya seperti aliran listrik yang tidak tersedia. Untuk itulah, alasan utama pemerintah hadir menjawab semua tantangan tersebut.

“Sehingga kami dalam mengembangkan pembangunan ini menggunakan teknologi solar panel atau tenaga surya untuk memastikan listrik selalu tersedia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tentunya, infrastruktur yang dibangun oleh BAKTI bukan cuman membangun di awal, tetapi juga memastikan bahwa itu harus tetap berlangsung setiap hari, setiap minggu bahkan setiap tahunnya,” jelasnya.



Capex dan Opex

Membangun infrastruktur TIK secara besar-besaran membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Menurut Dirut BAKTI Kominfo, pada saat awal pembangunan berlangsung, pemerintah memerlukan modal awal atau sering disebut sebagai *capital expenditure* (Capex). Modal pendanaan itulah yang kemudian menjadi aset pemerintah, termasuk tercatat sebagai aset BAKTI Kementerian Kominfo.

Sebagai contoh, pada saat pembangunan BTS 4G dan dioperasikan untuk kebutuhan masyarakat, namun terkendala saluran listrik. Maka modal awal tersebut digunakan sebagai syarat pengoperasian agar berjalan dengan baik.

“Kalau itu menggunakan listrik, berapa biaya listriknya? Berapa biaya untuk pengamanan lokasinya untuk pemeliharannya? Sama halnya kalau menggunakan satelit, berapa biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan transpondernya untuk memastikan bahwa BTS 4G tetap bisa menyiapkan layanan internet. Biaya itulah operasional yang kita namakan *operational expenditure* (Opex) setiap tahunnya. Inilah yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan Kominfo dalam hal ini BAKTI setiap tahunnya, hingga 10 tahun masa usia manfaat jaringan BTS 4G,” ungkapanya.



Sebagaimana yang kita ketahui bersama, BAKTI Kominfo akan membangun BTS 4G secara besar-besaran pada tahun 2021-2022. Harapan besar masyarakat telah terjawab sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang transformasi digital. Kementerian Kominfo sebagai leading sektor telah merampungkan peta jalan transformasi digital, untuk memastikan dan mengawal proses transformasi digital terjadi di seluruh sektor, termasuk di pedesaan yang berada di wilayah 3T dan perbatasan.

"Pengawasan inilah yang menjadi tugas Kominfo yang utama, khususnya tugas utama BAKTI adalah menghadirkan infrastruktur agar semua desa di seluruh Indonesia bisa dihadirkan sinyal 4G. Bahkan, pada akhirnya memastikan bahwa tidak ada satupun masyarakat Indonesia tertinggal ketika melaksanakan transformasi digital. Inilah tugas penting BAKTI Kominfo."

Pemanfaatan Ruang Digital

Dirut BAKTI Kominfo memiliki harapan besar kepada masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital yang telah tersedia dengan dukungan hadirnya sinyal 4G.

"Hadirnya sinyal itu bukan menyelesaikan persoalan awal, tapi disitulah awalnya kita masyarakat Indonesia memulai ruang digital. Ruang digital ini bagi kami adalah sebuah dua sisi mata uang, ketika itu bermanfaat positif akan berdampak positif untuk perekonomian kita, untuk kehidupan sosial. Tapi bisa juga menjadi sisi negatif kita ketika itu tidak dikelola dengan baik," kata Dirut BAKTI Kominfo.

Melalui penyelesaian infrastruktur yang ditargetkan akhir 2022 nanti, masyarakat juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan literasi digital, memanfaatkan secara positif sarana dan prasarana yang ada. Mengingat

pentingnya hal tersebut, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan secara simultan.

"Karena ketika hadirnya internet, positif dan negatif itu sangat sulit dipisahkan kecuali manusia-nya kita siapkan dengan proses literasi digital, ditambah nanti untuk peningkatan kemampuan talenta digitalnya. Disinilah harapannya, ketika itu disiapkan dengan secara apik dan baik akan berdampak kepada perkembangan, khususnya ekonomi digital di Indonesia," tegas Dirut BAKTI.

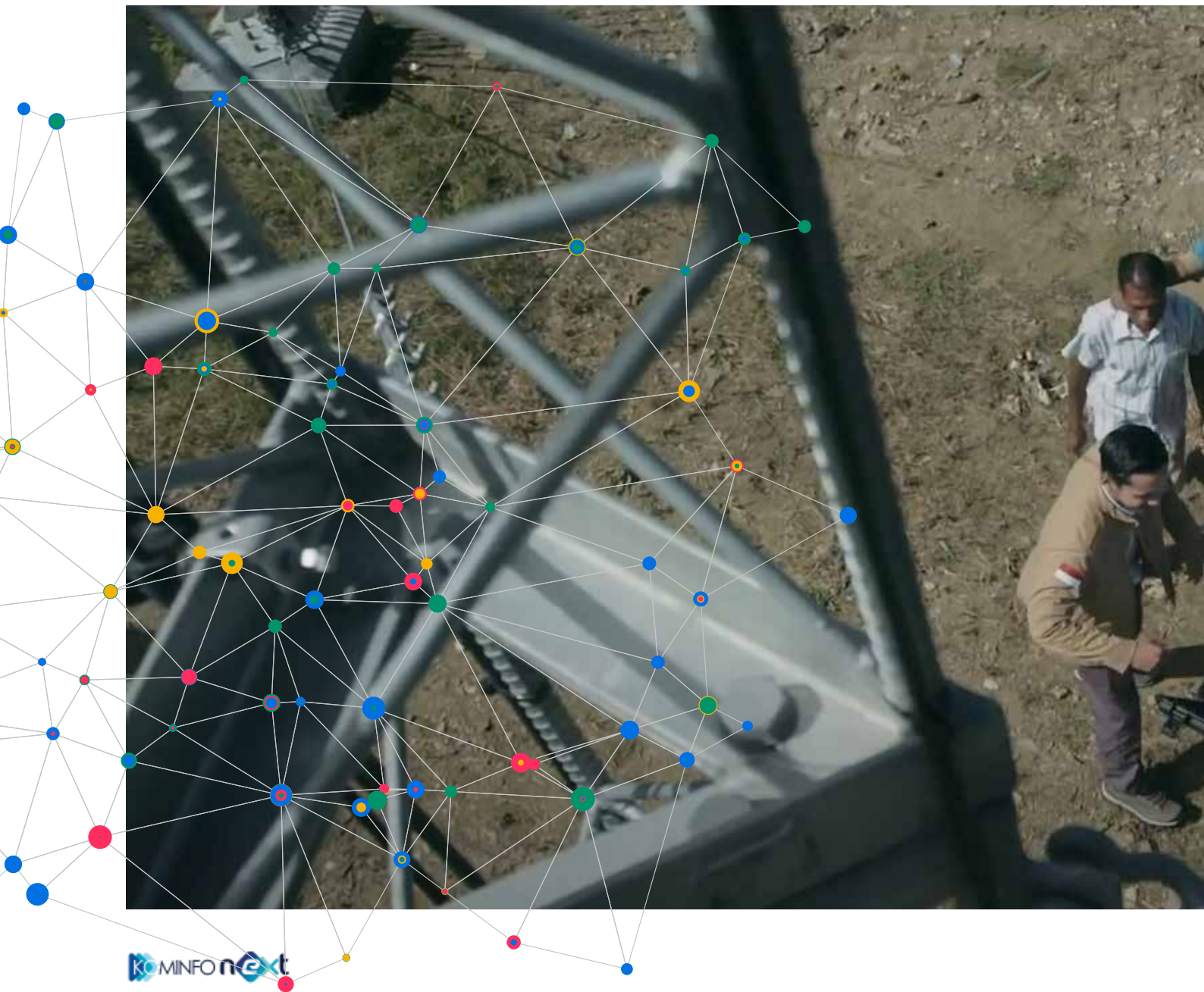
Cerita dan pengalaman panjang BAKTI Kominfo membangun negeri dengan tujuan mewujudkan Indonesia terkoneksi perlu disambut baik oleh masyarakat luas. Seperti halnya dalam cerita rakyat 1000 candi yang dijelaskan di awal. Terlepas dari bagaimana dinamika sosial masyarakat terdahulu yang hidup dalam sistem kerajaan, namun satu pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmah dari cerita 1000 candi itu adalah pemanfaatan dan pelestariannya yang dijaga dan dirawat dengan baik. Ya, cerita legenda 1000 candi itu secara fisik sampai saat ini masih bisa kita lihat, yakni candi Prambanan.

Demikian halnya dengan infrastruktur telekomunikasi atau TIK yang telah dibangun secara besar-besaran dengan target menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Jika infrastruktur yang disediakan tidak dirawat, dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri, tentu Indonesia akan sulit mewujudkan transformasi digital. Oleh karenanya, marilah gunakan segala kebutuhan digital yang sudah tersedia untuk bersama-sama menghantarkan Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju.

GERILYA BAKTI

MENYOBEEK SEKAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI WILAYAH 3T

Melihat Tantangan, Membaca Peluang



Tak dimungkiri bahwa disrupsi teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang inovatif di berbagai bidang. Beragam kemudahan digital telah menjadi penanda bahwa dunia sedang bergerak maju secara akseleratif. Sebagai salah satu negara besar, baik secara populasi maupun potensi ekonomi, Indonesia seyogianya memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dan proporsional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan.

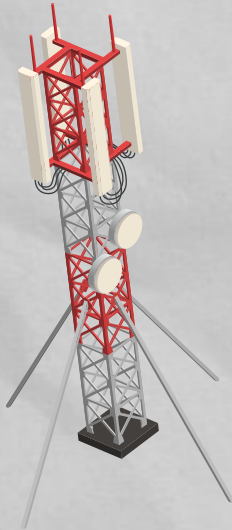
Menyongsong awal tahun 2020, ibaratkan *bleasing in disguise*, kemunculan pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu *trigger* yang mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. Bahkan, para ahli

memprediksikan secara reliabilitas bahwa industri telekomunikasi akan terus bertumbuh hingga 5,1% di tahun 2021, karena adanya peningkatan kebutuhan akses data internet.

Untuk itu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan mandat terkait percepatan transformasi digital nasional pada tanggal 3 Agustus 2020. Menindaklanjuti mandat tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate saat ini telah membuat agenda yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: **pembangunan infrastruktur digital secara masif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pelatihan digital untuk sumber daya manusia.**

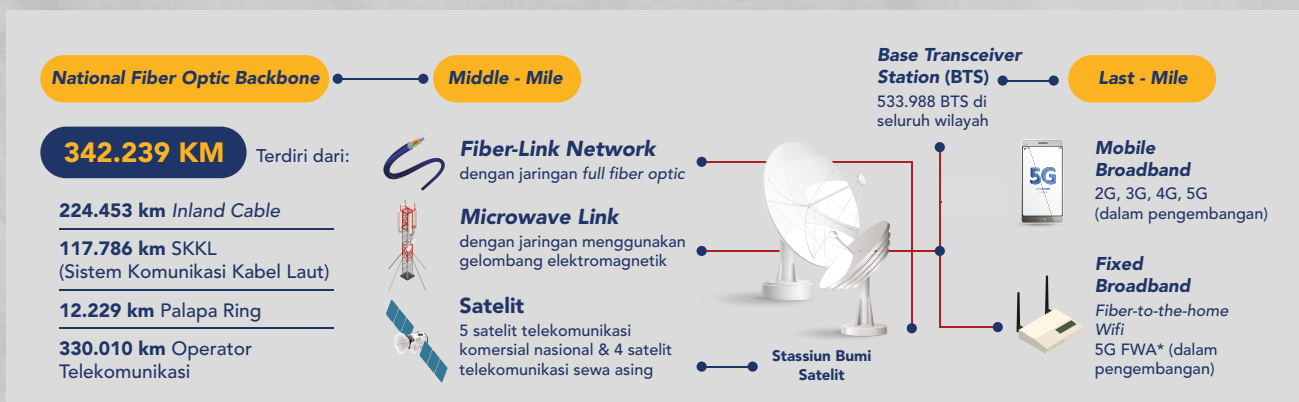


Dalam *grand design* ini, kehadiran Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kominfo sebagai prime mover pembangunan jaringan data di Indonesia sangat dibutuhkan. Infrastruktur yang telah dibangun Kementerian Kominfo melalui BAKTI sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:



- BTS 4G di 1.682 lokasi.
- Akses Internet di 11.817 lokasi termasuk di dalamnya 3.126 lokasi fasilitas layanan kesehatan sebagai bagian dari program KPC-PEN.
- Penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps.
- Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang terdiri dari 4.156 km kabel darat (*inland*) dan 8.073 km kabel laut (SKKL).
- Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1 yang saat ini sampai dalam proses penandatanganan *preparatory work agreement* dan diharapkan pada tahun 2021 ini sudah dapat mulai proses konstruksi.

Infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang dibangun tersebut melengkapi infrastruktur yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi swasta maupun BUMN.



Sumber: BAKTI KOMINFO 2021

Namun, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan tersebut rupanya belum cukup. Masih ada banyak desa-desa yang belum terlayani dengan akses internet. Menurut data, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah Non-3T.

Dari 9.113 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T, 1.209 desa/kelurahan di antaranya sudah terdapat BTS dengan teknologi 2G atau 3G yang perlu diupgrade menjadi teknologi 4G, di mana 1.096 desa/kelurahan di antaranya adalah merupakan BTS yang dibangun oleh BLU BAKTI dan saat ini sudah selesai di-*upgrade* menjadi BTS 4G, sedangkan 113 desa/kelurahan sudah terdapat BTS yang dibangun oleh operator telekomunikasi yang saat ini dalam proses *upgrade* ke 4G.

Menyisakan 7.904 desa/kelurahan yang sama sekali belum mendapatkan akses layanan 4G (*unserved 4G*). 7.904 desa/kelurahan 3T *unserved 4G* ini akan dibangun BTS 4G oleh Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI. Sedangkan 3.435 desa/kelurahan Non-3T akan dibangun BTS 4G oleh operator telekomunikasi.

Area	Jumlah Desa Total	Jumlah Rata-Rata Penduduk Dewasa	Jumlah Penduduk Dewasa 2019*
Sumatera dan Nusra	588	861	506.268
Kalimantan	776	719	557.944
Sulawesi	536	698	374.128
Maluku	800	542	433.600
Papua Barat	824	282	232.368
Papua-Bagian Tengah-Barat	971	552	535.992
Papua-Bagian Tengah-Utara	1819	554	1.008.463
Papua-Bagian Timur-Selatan	1590	420	667.343
Total	7.904	546	4.316.106

Sumber: BAKTI KOMINFO 2021

MEDAN YANG SULIT, AKSES JALAN, DAN TINGKAT ELEKTRIFIKASI JADI KENDALA UTAMA

Sudah lebih dari satu dekade BAKTI Kominfo berjuang untuk menyobek sekat arus informasi dan komunikasi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Tidak sedikit kendala dan tantangan yang dihadapi. Tantangan pemerataan akses data internet di Indonesia justru terletak pada besarnya negeri ini dengan begitu banyak pulaunya.

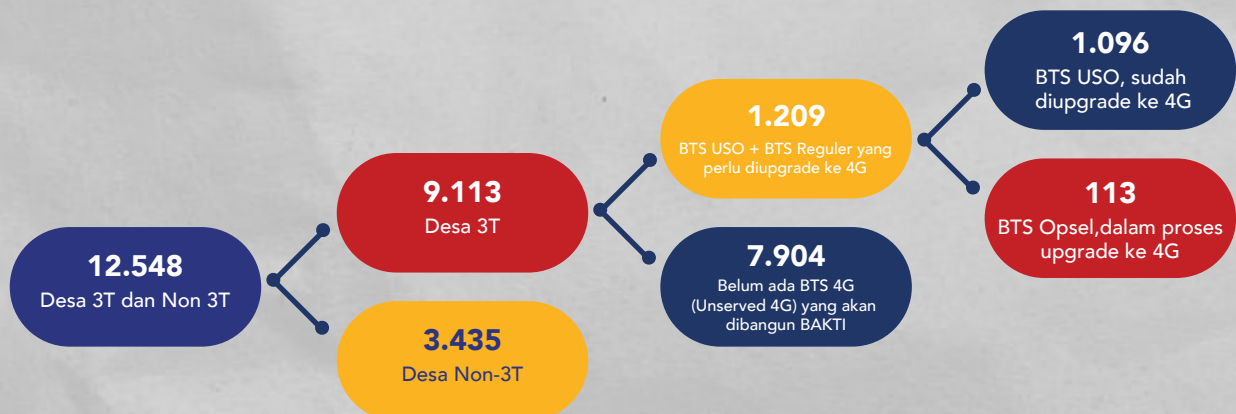
Khas geografi, bentangan alam, hingga terpisahnya pulau-pulau oleh lautan, membuat pembangunan infrastruktur termasuk penguatan sektor digital menghadapi tantangan yang tak mudah. Sebagai negara maritim, kondisi geografis Indonesia agaknya cukup menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Patut diakui bahwa area di luar pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak yang belum terjangkau internet.

Setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet. Inilah yang menjadi tugas besar BAKTI Kominfo untuk menyediakan fasilitas tersebut lewat percepatan transformasi digital.

Setelah Palapa Ring barat, tengah, dan timur selesai dibangun pada tahun 2019 lalu, BAKTI sampai saat ini pun masih bergerilya untuk membangun BTS (*base transceiver station*) di wilayah-wilayah pedalaman, khususnya 3T.

BAKTI Kominfo menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G. Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.



Sumber: BAKTI KOMINFO 2021

Sementara itu Direktur Sumberdaya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengajak kita semua untuk memanfaatkan teknologi seluler untuk meningkatkan peradaban dan desa. Fokus utama BAKTI Kominfo, menurut Fadhilah, adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator seluler.

Guna mewujudkan ikhtiar ini, pemerintah tengah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target yang akan dicapai, salah satunya oleh Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi. Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk

membangun 1795 BTS di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.

Selain kendala geografis, tantangan lain yang dihadapi oleh para penyedia jaringan ialah: tingkat keamanan di lokasi, akses jalan dan transportasi, serta minimnya pasokan listrik ke wilayah-wilayah yang dimaksud.

Dengan demikian, tentunya untuk menjangkau lokasi sangat menantang tersebut, pemerintah harus mengeluarkan ekstra biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T.

NO	PROVINSI	WILAYAH 3T	WILAYAH NON-3T
1	ACEH	9	56
2	BANTEN	3	1
3	BENGKULU	1	8
4	DKI JAKARTA	-	1
5	GORONTALO	35	31
6	JAMBI	-	8
7	JAWA BARAT	-	1
8	JAWA TENGAH	-	3
9	JAWA TIMUR	1	30
10	KALIMANTAN BARAT	726	179
11	KALIMANTAN SELATAN	-	169
12	KALIMANTAN TENGAH	41	579
13	KALIMANTAN TIMUR	37	251
14	KALIMANTAN UTARA	226	122
15	KEP. BANGKA BELITUNG	-	10
16	KEP. RIAU	74	41
17	LAMPUNG	5	1
18	MALUKU	635	44
19	MALUKU UTARA	435	142
20	NUSA TENGGARA BARAT	70	1
21	NUSA TENGGARA TIMUR	542	103
22	PAPUA	4605	139
23	PAPUA BARAT	932	478
24	RIAU	13	36
25	SELAWESI BARAT	4	194
26	SELAWESI SELATAN	-	131
27	SELAWESI TENGAH	465	221
28	SELAWESI TENGGARA	111	231
29	SELAWESI UTARA	17	96
30	SUMATERA BARAT	47	6
31	SUMATERA SELATAN	-	47
32	SUMATERA UTARA	79	75
TOTAL		9113	3435

Sumber: BAKTI KOMINFO 2021

Guna menyikapi kendala lapangan, BAKTI Kominfo selalu mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.

Di Timur, khususnya Papua, pembangunan infrastruktur BTS harus menghadapi kelebihan hutan Papua, logistik yang kerap dihadap gelombang besar. Sebaliknya, angka permintaan pun masih cukup minim. Inilah yang membuat pemerintah sulit mendapatkan mitra dari pihak swasta dan pemain bisnis teknologi informasi yang rela mengoperatori layanan digital di sana.

PERCEPAT PEMBANGUNAN, MENKOMINFO GANDENG TNI

Dalam rangka percepatan pembangunan BTS di wilayah 3T, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate pada Rabu (5/5/2021) lalu mengunjungi Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kerjasama antara pemerintah dan TNI dalam hal pembangunan BTS di wilayah 3T.

Saat menerima kunjungan Menkominfo tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya akan membantu mengamankan jalannya pembangunan 5.000 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Papua dan Natuna yang diprakarsai Kementerian Kominfo.

"Pembangunan infrastruktur digital oleh Kementerian Kominfo merupakan program strategis yang harus didukung untuk pemerataan akses internet di seluruh

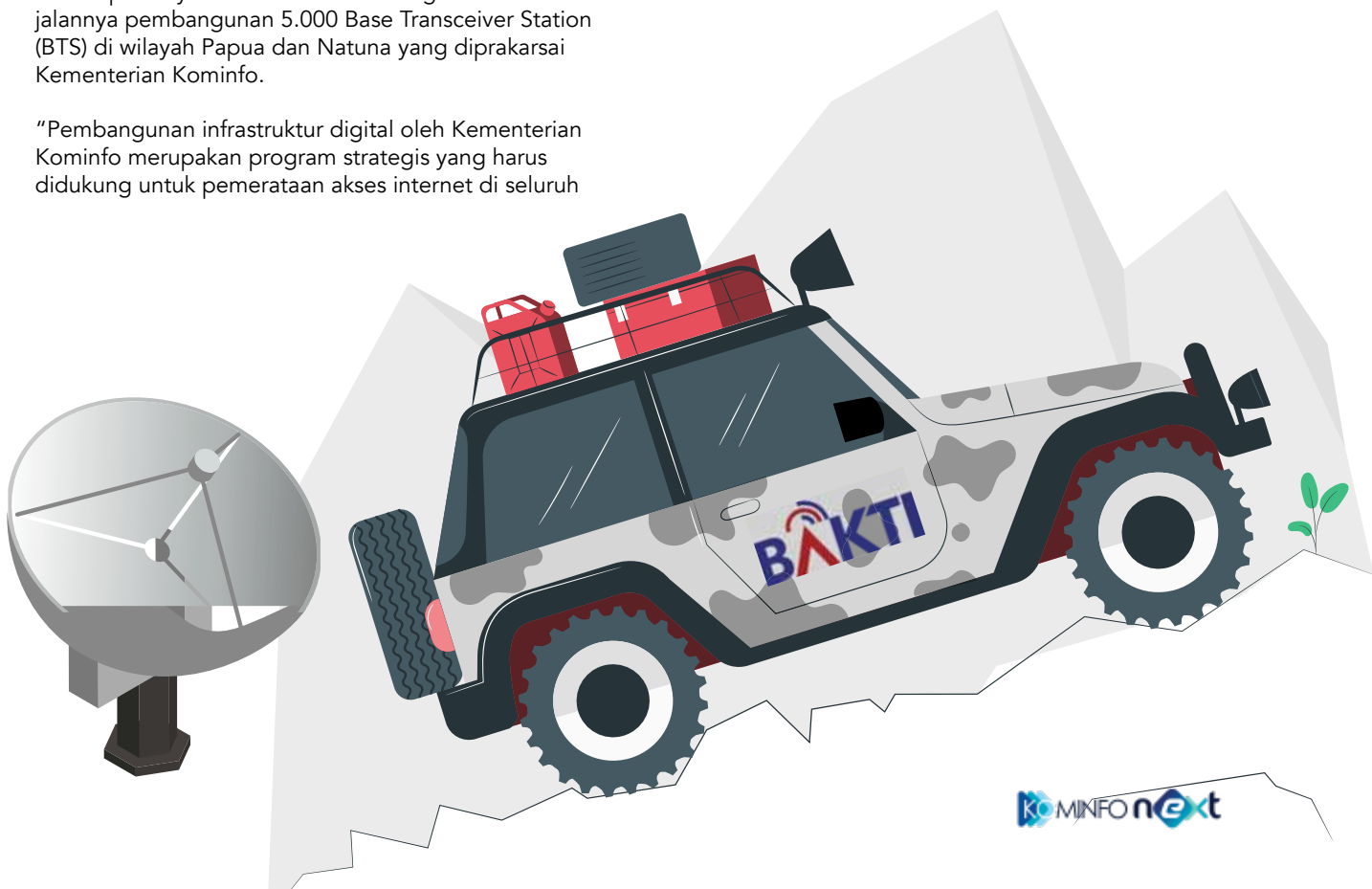
wilayah Indonesia. Dengan adanya pemerataan akses internet, maka dapat mendukung sistem pertahanan negara dan mempermudah pelaksanaan tugas pokok TNI," tutur Panglima TNI dalam keterangan tertulis Puspem Mabes TNI, Rabu (5/5/2021).

Panglima TNI mengatakan bahwa TNI akan membantu pengamanan selama dan sesudah pembangunan BTS di daerah terpencil di seluruh wilayah NKRI. Pengamanan tersebut menjadi penting dilakukan untuk mempercepat proses peningkatan fasilitas dan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai sektor.

Kementerian Kominfo akan membangun BTS tersebut di area yang tidak dimasuki operator seluler khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. "Hari ini secara khusus saya bertemu dengan Panglima TNI untuk menerjemahkan secara teknis program-program dan kebijakan Presiden RI Joko Widodo di sektor Kominfo," jelas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, Kemenkominfo menggandeng TNI untuk membantu pengamanan pembangunan infrastruktur digital atau teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memadai di seluruh wilayah Tanah Air, khususnya di Papua.

"Hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan keamanan selama proses pembangunan BTS di wilayah Papua, mulai dari pengiriman logistik dan bahan yang akan digunakan dalam membangun BTS," tambahnya. (Emild Kadju)



BAKTI Kominfo

sebagai Tonggak
Akselerasi
Transformasi
Digital di Indonesia



Selayang Pandang tentang BAKTI

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi disingkat BAKTI lahir pada tahun 2006. Pada awal kelahiran, BAKTI memiliki nama Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan atau BTIP yang bertujuan untuk 'melipat jarak' akses informasi dan telekomunikasi antara masyarakat rural dan urban.

Nama BTIP sendiri sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/PER/M. Kominfo/11/2006. BTIP juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada 21 Desember 2006.

Seiring dengan disrupsi media, telekomunikasi, dan komunikasi publik, serta tuntutan akan ketersediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP pada tanggal 19 November 2010 bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Transformasi tersebut berlandas pada Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M/ KOMINFO/11/2010.

Badan Layanan Umum BP3TI awalnya merupakan unit eselon yang akhirnya berubah menjadi unit pelaksana teknis non-eselon dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Kominfo pada tahun 2017. Transformasi organisasi dan tata kerja ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika, yang memang sejak tahun 2015 telah mengalami redesign.

Transformasi BP3TI didasari pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan struktur organisasi, yang semula strukturnya didasari pada proses (*process-based*), menjadi didasari pada output layanan (*output-based*), yaitu infrastruktur dan ekosistem. Namun tetap menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Melansir laman resmi BAKTI Kominfo, perubahan nama menjadi BAKTI untuk mempermudah publikasi dan

branding instansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, BAKTI memiliki arti yang positif, yaitu 1) tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia; 2) memperhambakan diri; setia. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi BP3TI untuk memeratakan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia, dan melayani segenap masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2018, perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tertanggal 23 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, maka secara resmi nama BAKTI digunakan sebagai pengganti dari BP3TI.

BAKTI merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BAKTI dipimpin oleh Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Gerilya BAKTI: Realisasi dan Visi Besar Indonesia Maju

Dalam catatan BAKTI pada akhir 2020, setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet. Untuk itu, BAKTI menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sendiri sudah memberikan ultimatum bahwa fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah tengah berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, untuk mencapai target yang akan dicapai. Salah satunya

ialah kerjasama dengan Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi. Lebih lanjut, Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1795 BTS di kawasan Papua Barat dari total 7000-an BTS yang menjadi target BAKTI Kominfo di seluruh Indonesia.



Pembangunan di Wilayah 3T:

Antara Tantangan dan Peluang



Dalam upaya akselerasi transformasi digital di wilayah 3T, tentunya ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan, seperti kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala. Medan yang begitu sulit tentunya menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non 3T.

Guna menyikapi kendala lapangan tersebut, BAKTI Kominfo mengadakan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh

pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.

BAKTI menjalankan misi memperluas layanan internet terutama dalam program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika. Layanan konkretnya seperti program Akses Internet untuk Desa. Layanan ini menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, BAKTI juga menyediakan BTS di wilayah *blankspot*, yang mana program tersebut juga menjangkau wilayah 3T.

Lima Paket Kontrak Payung, Percepat Pemerataan BTS 4G di Wilayah 3T

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penandatanganan kontrak payung untuk Paket 3, Paket 4 dan Paket 5 dilakukan dengan menggunakan teknologi hologram dari lokasi masing-masing. Prosesi penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, Jakarta.

"Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022," ujar Menteri Johnny dalam Peluncuran

Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/02/2021).

Melaporkan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi kepada Kepala Negara, Menteri Kominfo menyatakan jumlah sisa BTS tersebut melingkupi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

"Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024. Yang terdiri dari unsur *capital expenditure* dan *operational expenditure* seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO)," jelasnya.

Selain dana yang berasal dari USO, Menteri Kominfo menjelaskan bahwa sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni (RM).

Kontrak Paket 1 dan Paket 2 telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI Kominfo. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp9,5 triliun.

"Sedangkan saat ini, kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun," jelas Menteri Johnny.

Pembangunan BTS di wilayah 3T merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh Tanah Air. Kementerian Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK, meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital untuk memperkecil *digital divide*.

Upaya pemerataan akses internet ini akan dilanjutkan Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2016). Proyek besar ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahun ke depan atau pada akhir tahun 2022, lebih cepat sepuluh tahun dari rencana penyelesaian awal di tahun 2032.



Bangun BTS 4G Berbasis Wilayah, Menkominfo: Target Selesai Tahun 2022

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk sinyal 4G di seluruh Indonesia pada tahun 2022.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan selama ini pemerintah membangun infrastruktur TIK berbasis pada jaringan atau *network*. Untuk mempercepat pemerataan di seluruh Indonesia, pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di *upstream* namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah.

"Jadi pendekatannya sangat teritorial, untuk itu telah dilakukan analisis di mana saja di Indonesia ini berbasis desa atau kelurahan, titik-titik yang belum terjangkau sinyal yang secara umum dikenal sebagai *blank spot*," ujarnya dalam Ngobrol Santai Bareng Menkominfo, di InterContinental Bali Resort, Denpasar Bali, Jum'at (26/03/2021).

Menteri Johnny memaparkan khusus di wilayah 3T terdapat total 9.113 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut sudah dibangun BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan. Sedangkan sisanya sebanyak 7.904 telah diprogramkan pada tahun 2021 dan 2022. Sementara

untuk wilayah Non-3T berjumlah 3.435 desa dan kelurahan yang juga saat ini sedang disiapkan oleh operator seluler.

"Dalam rangka membangun di *the last mile* atau di titik akhir infrastruktur TIK untuk menjangkau wilayah desa dan kelurahan itu, dilakukanlah rapat (*Kick-off Meeting*) di Denpasar, Bali mulai kemarin untuk meneruskan penandatanganan kontrak payung pembangunan BTS di 7.904 desa yang dilaksanakan di hadapan Presiden di Istana Negara," tandasnya.

Menurut Menteri Kominfo, melalui *Kick-off Meeting* bersama konsorsium, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo segera menyelesaikan layanan sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau.

"Sehingga dilakukan usaha pembangunan infrastruktur untuk memastikan sinyal di wilayah terdepan bisa dihasilkan, yang dibagi dalam dua bagian yang dikenal dengan wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dilakukan oleh BAKTI Kominfo, dan wilayah Non-3T yang akan dikerjakan beramai-ramai bersama operator seluler," jelasnya.

Mitigasi Risiko

Pembagian berdasar teritorial juga menjadi dasar untuk kerja sama dengan pemenang lelang Paket BTS 4G. Menurutnya, pembicaraan dan penjelasan dalam *Kick-off Meeting* merupakan awal dari satu mekanisme implementasi kontrak dengan objektif, yang diharapkan sasaran dan tujuan dari pembangunan infrastruktur BTS 4G berjalan lancar sesuai jadwal dan jumlah yang disepakati.

“Yang pertama pastinya pesan-pesan penyelenggara atau yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, ada 3 grup perusahaan yang terbagi dalam 5 wilayah kerja yang kemudian diditilkan menjadi 11 area di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur,” ujar Menteri Johnny.

Menkominfo menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS 4G nantinya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 4.200 BTS untuk 4200 desa dan kelurahan akan dibangun pada tahun 2021.

“Dan sisanya 3.700 dibangun di tahun 2022, sesuai ketersediaan pembiayaan melalui mekanisme *blended financing* atau bauran pembiayaan, ada komponen rupiah murni, komponen PNPB sektor Kominfo dan komponen Universal Service Obligation,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan dalam *Kick-off Meeting* berlangsung pembahasan dan penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing konsorsium melalui beberapa penekanan.

“Penekanan yang pertama adalah jadwal kerja sudah diatur seperti apa, yang kedua adalah pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk memungkinkan transfer teknologi khususnya tenaga-tenaga lokal baik dilatih di dalam negeri, maupun dilatih di luar negeri di tempat perusahaan-perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Menurut Menkominfo masalah krusial yang dihadapi saat ini salah satunya adalah mitigasi risiko yang ditimbulkan. Diantaranya, memastikan tersedianya lahan.

Ketersediaan lahan merupakan proses perizinan awal di daerah yang nantinya harus menjadi perhatian bersama.

Oleh karena itu, Menteri Johnny berharap BAKTI dan konsorsium harus kerjasama dengan baik, termasuk juga perkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan masalah krusial yang kedua proses perizinan. Mengingat target penyelesaian dikerjakan dalam jadwal yang ketat, hal itu diharapkan proses perizinan juga bisa dilakukan dengan baik dan cepat.

Dalam agenda *Ngobrol Santai Bareng Menteri Komunikasi dan Informatika* tentang Kesiapan Pembangunan Infrastruktur BTS, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif.





Kunjungi Kepri, Menteri Johnny Inisiasi BTS 4G 3T dan Tinjau Lokasi Pembangunan PDN

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021). Di Kabupaten Natuna, Menkominfo dijadwalkan meletakkan batu pertama atau *ground breaking* pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) 4G di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, dan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Menurut Menkominfo infrastruktur telekomunikasi dan Internet adalah salah satu pilar utama percepatan transformasi digital nasional. Dengan selalu memberikan perhatian dan pembangunan pada daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.

“Kita berharap pembangunan BTS 4G ini segera dapat mendorong efektivitas dan produktivitas masyarakat dengan melakukan aktivitas secara digital,” jelasnya di di Batam, Kamis (22/04/2021).

Menteri Johnny menyatakan *ground breaking* merupakan rangkaian awal dalam membangun infrastruktur BTS serupa di seluruh desa/kelurahan wilayah Tertinggal Terdepan, Terluar (3T) di Indonesia, yang selama ini belum terlayani jaringan sinyal 4G.

“Pembangunan infrastruktur tersebut dibangun pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Berdasarkan data, saat ini masih ada 7.904 desa/kelurahan di wilayah 3T yang belum mendapatkan akses layanan 4G. Menkominfo menilai, pemanfaatan sinyal 4G untuk layanan digital bagi masyarakat sekitar akan dapat meningkatkan kualitas hidup bersama baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. “Untuk itulah dalam rangka terus membangun layanan telekomunikasi yang memadai bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menteri Johnny tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 09.00 WIB disambut langsung Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Kepulauan Natuna, Abdul Hamid Rizal. Setelah singgah di Ruang VVIP bandara Hang Nadim Batam, Menteri Johnny dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Natuna.

Setelah meletakkan batu pertama pembangunan BTS 4G di Kabupaten Natuna, Menteri Johnny dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja di Kota Batam untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Pusat Data Nasional.

Selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna dan Kota Batam, Menteri Johnny didampingi Direktur Utama BAKTI Anang Latif, Direktur Infrastruktur BAKTI Bambang Noegroho, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid Rizal.

Bangun 17 BTS di Kabupaten Natuna, Menteri Johnny: Kominfo Terus Lakukan Identifikasi Wilayah *Blankspot*



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meletakkan batu pertama (*ground breaking*) pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 17 desa dan kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menkominfo menegaskan akan terus melakukan identifikasi wilayah *blankspot* untuk menjamin pemerataan akses jaringan 4G.

“Di Kabupaten Natuna sendiri akan dibangun 17 Base Transceiver Station untuk 17 desa, yang didukung nanti dengan kehadiran signal cepat 4G,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021).

PORTAL
KOMINFO.GO.ID

Menteri Johnny menjelaskan Pemerintah akan membangun 16 BTS yang berada di 12 desa di Kabupaten Kepulauan, 5 BTS di desa yang berada di Kabupaten Bintan dan di Kabupaten Karimun dibangun 1 BTS untuk satu desa. Meskipun demikian, Menkominfo menyatakan pihaknya akan terus melakukan identifikasi wilayah blankspot yang masih ada.

“(Pembangunan BTS) Itu belum cukup karena masih banyak wilayah yang *blankspot*, wilayah-wilayah blankspot yang menjadi identifikasi ini dilakukan melalui proses digitalisasi dari instrumen peralatan yang ada di Jakarta, di Kominfo dan operator seluler,” jelasnya.

Mengenai pembangunan infrastruktur TIK tahun 2021, Menkominfo menyatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 BTS di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dilakukan dalam 5 paket.

“Hari ini paket 1 dan paket 2 dibawah konsorsium *fiberhome* bersama rekan-rekan konsorsium *members*. Tentu perlu dilakukan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Menteri Johnny menjelaskan pihaknya terus melakukan verifikasi lapangan dan akan dilakukan *review* desain dan final desain untuk menentukan titik-titik lokasi dan pilihan teknologi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

“Tujuan kunjungan saya kali ini dan ini kunjungan pertama saya ke Pulau Natuna, sudah beberapa kali

ke Provinsi Riau, kali ini dengan dua tujuan setidaknya yang pertama dalam kaitan dengan peletakan batu pertama, awal pembangunan Base Transceiver Station untuk wilayah 3T,” jelasnya.

Selain di Kabupaten Natuna, Menkominfo juga melakukan kunker di Kota Batam. “Yang kedua kunjungan saya ke Kepulauan Riau adalah dalam kaitan dengan melihat potensi pembangunan *government cloud* atau pusat data nasional pemerintah di Kepri. Kita berencana membangun beberapa pusat data pemerintah dalam rangka menghasilkan satu data indonesia,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan pusat data nasional itu merupakan upaya untuk menghasilkan Satu Data Indonesia. Hal itu bisa terwujud melalui proses interoperabilitas data dan *data cleansing* serta *data cleaning* dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan.

“Termasuk pengambilan kebijakan perlindungan sosial bagi jutaan masyarakat di saat pandemi COVID-19. Kunjungan saya untuk dua kunjungan tersebut memberikan gambaran bagi kita sekalian setidaknya bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan meruntuhkan dan merobohkan semangat kita untuk terus membangun indonesia, termasuk membangun di sektor TIK,” tegasnya.

Menkominfo menegaskan pandemi COVID-19 mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba dan melakukan akselerasi pembangunan

TIK nasional. “Kita menunjang, mendukung dan menjemput akselerasi transformasi digital dalam kaitan dengan industri 4.0,” tandasnya.

Menteri Johnny mengingatkan kembali pandemi COVID-19 bisa dikalahkan melalui semangat dan disiplin. Tentu saja dengan memenuhi prasyarat utama pakai masker, jaga jarak, cuci tangan secara teratur, serta program vaksinasi yang tengah dilaksanakan Pemerintah.

“Di saat yang bersamaan pemerintah di bawah *leadership* Presiden Joko Widodo melakukan usaha penggalakan vaksinasi nasional kita untuk menghasilkan imunitas warga. Kedua-duanya tugas yang harus kita lakukan bersama-sama karena itu persyaratan *take off*, tinggal landas kita, baik masa pandemi maupun pasca pandemi,” paparnya.

Selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Utama BAKTI Anang Latif, Direktur Infrastruktur BAKTI Bambang Noegroho, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid Rizal.



Kunjungi Flores Timur dan Lembata, Menteri Johnny: Bencana Tak Hambat Bangun Infrastruktur TIK

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengunjungi Kabupaten Flores Timur dan Lembata, Nusa Tenggara Timur, Senin (12/04/2021) untuk memantau jaringan dan layanan jaringan telekomunikasi dan internet di daerah yang minggu lalu mengalami musibah bencana alam dan tanah longsor. Selain itu, Menkominfo juga meninjau distribusi bantuan yang telah dikirimkan minggu lalu. Menteri Johnny menegaskan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan tetap berlanjut.

“Kedatangan saya juga untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur TIK tetap dapat berlangsung, termasuk di NTT. Kejadian ini tidak menghentikan upaya kita tersebut, bahkan mendorong untuk lebih

PORTAL
KOMINFO.GO.ID

fokus membangun,” tegas Menteri Johnny di Posko Selandoro, Pulau Lembata, Senin (12/04/2021). Menurut Menkominfo, Pemerintah terus bangun infrastruktur TIK untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

“Pada tahun 2021 akan kita bangun 421 BTS 4G di NTT, dalam rangka untuk terus mendorong transformasi digital,” tandasnya.

Hingga tahun ini, Kementerian Kominfo menyediakan 1333 akses internet di NTT. “130 di antaranya masih *down* karena masalah catu daya. Dalam situasi seperti ini BAKTI merelokasi beberapa akses internet ke daerah-daerah terdampak untuk memprioritaskan koordinasi tanggap bencana,” paparnya.

Menteri Johnny mendarat di Larantuka dan melanjutkan kunjungan ke helikopter menuju ke Desa Nellelamadika, Kecamatan Ile Boleng di Adonara Timur. Di tempat itu, Menkominfo memantau dampak banjir dan tanah longsor serta berdialog dengan pengungsi. Perjalanan Menteri Johnny berlanjut ke Pulau Lembata. Di tempat itu, Menkominfo mengunjungi Posko Selandoro dan Kantor Desa Lewoleba. Dalam kunjungan tersebut, Menkominfo didampingi oleh Direktur BAKTI, Anang Latif dan Bupati Flores Timur, Anton Hadjon.

Dukungan Penanganan Bencana Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo telah mengirimkan tim untuk merelokasi akses internet perangkat satelit (VSAT) di lokasi pengungsian di Lembata dan Flores Timur. VSAT menyediakan akses internet agar memudahkan koordinasi dan komunikasi masyarakat terdampak banjir besar dan juga para relawan, aparat, dan pemerintah daerah.

“Selain ingin menyampaikan belasungkawa, saya juga ingin memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi di NTT dapat pulih dan berfungsi kembali. Dari sisi

infrastruktur telekomunikasi, di Nusa Tenggara Timur terdapat 2794 BTS aktif. Dari jumlah tersebut, 450 BTS terdampak dan belum berfungsi dengan baik. Sejumlah 444 di antaranya milik operator seluler,” papar Menkominfo.

Selain infrastruktur tersebut, BAKTI Kominfo menyediakan juga 10 unit ponsel satelit atau *satphone*. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mitigasi kebencanaan sebelumnya, BAKTI Kominfo mengantisipasi sulitnya akses telekomunikasi dengan memanfaatkan teknologi *satphone*.

“Selain itu, Kominfo melalui BAKTI juga mendistribusikan 40 buah telepon satelit untuk daerah-daerah bencana di NTT. Dengan telepon satelit diharapkan pemerintah daerah dapat tetap melakukan komunikasi dan koordinasi meski jaringan telekomunikasi terestrial belum pulih,” terang Menteri.

Rincian distribusi ponsel satelit adalah: Kabupaten Alor (5 unit), Kabupaten Malaka (2 unit), Kabupaten Lembata (11 unit), Kabupaten Flores Timur (5 unit), Pulau Adonara (7 unit), dan 10 sisanya unit diberikan langsung ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengenai BTS BAKTI Kominfo, Menteri Johnny menyatakan sudah pulih sebagian besar setelah ada pasokan listrik dari genset.

“BTS milik BAKTI Kominfo yang masih *down* ada 6 dari 156 BTS. Sebagian besar penyebab matinya BTS adalah karena ketiadaan listrik. Kita sudah coba menggunakan genset namun itu pun sangat bergantung kepada pasokan bahan bakar,” terang Menkominfo.

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah dan operator seluler sudah mengupayakan perbaikan sesegera mungkin dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pasokan catu daya.

“Untuk tower yang roboh dan hanyut, jumlahnya ada 6, tentu saja dibutuhkan pembangunan kembali. Nanti kita akan sesuaikan pembangunan kembali dengan rencana relokasi penduduk terdampak. Sepertinya relokasi yang disiapkan juga tidak terlalu jauh jarak dari lokasi sebelumnya,” papar Menteri Johnny.

Selain bantuan berbagai infrastruktur telekomunikasi tersebut, beberapa hari setelah musibah BAKTI juga mengirimkan tim bantuan kemanusiaan dengan membawa logistik berupa:

1. Tenda pleton 10 unit
2. Terpal 20 unit
3. Masker 5.000 pieces
4. Diapers anak 1.000 bungkus
5. Diapers orang tua 1.000 bungkus
6. Pembalut wanita 1.000 bungkus
7. Makan kering, biskuit, makanan siap saji 5.000 pax
8. Obat-obatan 1.000 pak yang di dalamnya ada obat sakit kepala, demam, paracetamol, diare, obat kulit caladine, autan anti nyamuk
9. 500 selimut
10. 20 matras/alas tidur

“Seluruh bantuan tersebut telah dikirim ke Kabupaten Bima (NTB), Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata (NTT),” jelas Menkominfo.



Perjalanan untuk Indonesia Terkoneksi

Memasuki era digital, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Arahan ini dimaksudkan sebagai upaya mendongkrak pemanfaatan sinyal 4G oleh masyarakat khususnya pada wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Era digital membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan sinyal 4G dalam berbagai bidang pekerjaan guna meningkatkan kualitas hidup bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas

Feriandi |
| Mirza

Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) salah satunya pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dan Tol Langit Palapa Ring.

Tim KominfoNext memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara bersama Kepala Divisi Infrastruktur *Lastmile/Backhaul*, Direktorat Infrastruktur BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza. Melalui wawancara tersebut, Feriandi menjelaskan bagaimana perjalanan karirnya selama di Kominfo hingga ia bisa dilantik menjadi Kepala Divisi Infrastruktur *Lastmile/Backhaul*.

Sebelum ia bergabung di Divisi Infrastruktur *Lastmile/Backhaul* pada September 2020, BAKTI telah sukses membangun sekitar 1.600 BTS pada daerah 3T. Rencananya,

pembangunan tersebut akan dipercepat dengan skema baru melalui penyediaan BTS bagi 7.904 desa/kelurahan di daerah 3T yang akan dibangun mulai tahun 2021 hingga tahun 2022.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pembangunan BTS di era Menteri Johnny G. Plate berbeda dengan era sebelumnya. BTS yang sekarang dibangun oleh BAKTI adalah infrastruktur milik negara. "Kalau dulu BTS kita sebutnya *mining service*. Kebijakan pada jaman Pak Rudiantara (Menkominfo periode 2014-2019, red.) itu *full mining service* sehingga kita hanya menyewa tower tersebut. Kebijakan Pak Johnny G. Plate yaitu belanja modal membuat tower yang dibangun menjadi aset negara atau Barang Milik Negara (BMN). Tetapi tetap ada *mining service* karena untuk operasional tetap belanja jasa lainnya," ungkap Feriandi.

Feriandi menekankan pada prinsipnya, pihak yang harus melakukan pembangunan infrastruktur digital adalah operator seluler. Namun operator seluler tidak bisa membangun di beberapa daerah dengan alasan tidak menguntungkan secara bisnis.



Hal tersebut yang akhirnya menjadi **latar belakang** mengapa **pemerintah membangun BTS dan Palapa Ring di daerah 3T**. Tidak hanya membangun dari sisi infrastruktur, saat ini pemerintah juga berupaya terus melakukan **pengembangan ekosistem digital**

Tidak hanya BTS yang menjadi media pemancar sinyal, BAKTI juga membangun Palapa Ring yang bertujuan untuk menjangkau Ibu Kota Kabupaten di Indonesia yang tidak dijangkau oleh operator seluler. Terdapat total 57 Ibu Kota Kabupaten yang dihubungkan BAKTI melalui Palapa Ring.

“Sebelumnya saya menjadi Kepala Divisi Infrastruktur *Backbone* yang mengerjakan Palapa Ring. Walaupun pada saat saya masuk Palapa Ring Barat sudah selesai, akan tetapi saya ikut andil dalam pembangunan Palapa Ring Tengah yang selesai pada 21 September 2018. Sementara Palapa Ring Timur yang paling susah selesai pada Agustus 2019,” ungkap Feriandi.

Palapa Ring merupakan jaringan *backbone* dengan tujuan utama untuk menjangkau seluruh ibukota kabupaten yang berjumlah 514. Dengan keperluan panjang kabel sebanyak 350.000 km, BAKTI berkewajiban untuk membangun 12.000 km. Dari 514, BAKTI membangun 57 ibukota kabupaten di mana sebagian besar berada di daerah timur yaitu Papua.



Palapa Ring kita sediakan untuk dapat dimanfaatkan bagi operator lain yang memang mau membangun. Saya mengambil contoh kabupaten yang terdampak signifikan dengan adanya Palapa Ring adalah di **Kabupaten Natuna di mana bahkan kecepatan 4G berada di atas Jakarta**



Tantangan dalam Membangun Konektivitas Indonesia

Pria 43 tahun ini menilai bahwa terdapat perbedaan tantangan dalam membangun infrastruktur di setiap daerah di Indonesia. Menurutnya, daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara dinilai tidak mengalami kendala yang cukup besar. Namun, daerah timur khususnya Maluku dan Papua memiliki kendala yang lebih berat dibandingkan daerah lainnya.

“Kendala yang sulit untuk diatasi adalah medan lokasi yang susah dijangkau dan menghambat adanya perpindahan logistik. Selain itu, faktor iklim juga ikut berperan mengingat daerah Papua dan Maluku lebih banyak yang dijangkau oleh Pesawat. Sehingga dalam cuaca buruk, pesawat maupun helikopter tidak akan berani terbang dan menunda,” tutur Feriandi

Kendala lainnya adalah faktor sosial masyarakat yang masih rawan konflik, sehingga pemerintah harus melakukan pendekatan lebih ekstra kepada masyarakat daerah tersebut.

Pandemi COVID-19 pun menghambat pembangunan infrastruktur, khususnya pada awal pandemi. Kewajiban untuk isolasi mandiri menjadi

salah satu alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur. Ketergantungan terhadap mitra pun menjadi alasan lain dikarenakan setiap mitra memiliki aturan yang berbeda menghadapi pandemi COVID-19. Akan tetapi kebijakan sektor tertentu untuk tetap bekerja salah satunya sektor komunikasi mempermudah pembangunan selama infrastruktur.

Selama pandemi, Feriandi melakukan strategi untuk tidak terlalu banyak melakukan pembangunan infrastruktur di daerah Timur. BAKTI membangun infrastruktur di daerah barat yang dinilai lebih mudah dalam transportasi dan logistik. Maluku menjadi salah satu daerah Timur yang dilakukan pembangunan pada saat pandemi.

Bangga jadi

— Bagian dari BAKTI

Sebelum perbincangan berakhir, Feriandi mengatakan bahwa dirinya bangga menjadi bagian dari BAKTI yang dapat berkontribusi untuk menghadirkan layanan internet di daerah 3T.

Pria yang memiliki prinsip hidup untuk tidak berada pada zona nyaman mengaku lega ketika sudah menyelesaikan membangun Palapa Ring Timur dikarenakan kesulitan dalam membangun infrastruktur tersebut. Feriandi mengingat bahwa pada saat itu selalu terdapat masalah setiap harinya, mulai dari pemotongan kabel hingga helikopter yang tidak bisa terbang.

Dalam memimpin divisinya, Feriandi memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang fleksibel, di mana akan ada saatnya menjadi otoriter dan demokratis. Feriandi memberikan kesempatan kepada timnya untuk berkembang dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri.

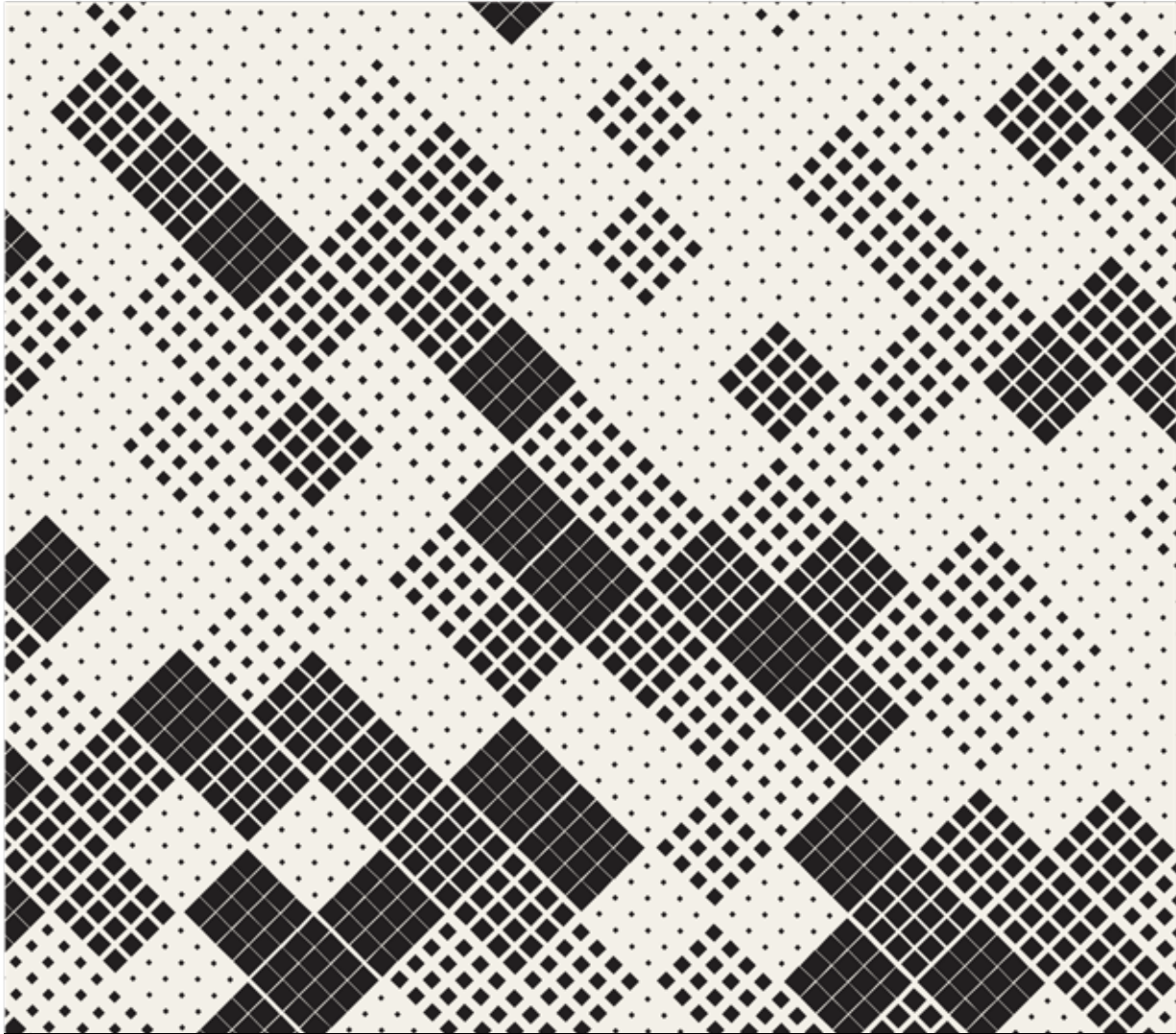
“Apabila mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka mereka akan datang ke saya tapi dengan opsi solusi untuk mengambil keputusan bersama. Kami juga sering melakukan diskusi secara informal dan melakukan *weekly meeting* selama 1 – 2 jam untuk melihat perkembangan. Saya juga mewajibkan mereka untuk menggunakan *time set* di mana saya mereka harus melaporkan progress pekerjaan,” ucap Feriandi.

“

Pastinya ada perasaan bangga, puas, dan lega menjadi satu ketika berhasil membangun infrastruktur. Akan tetapi ada satu hal yang ditekankan oleh Pak Anang (Direktur BAKTI, red.) yang masuk ke hati bahwa **kita harus ada legacy dalam bekerja**. Kita harus ada sesuatu yang ditinggalkan untuk selanjutnya dapat kita ceritakan ke anak cucu kita



Feriandi berharap agar BAKTI bisa membangun lebih banyak BTS. Feriandi yakin dengan membangun lebih banyak BTS dengan mengutamakan sisi kualitas, maka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar terutama di daerah 3T. Feriandi menginginkan untuk terciptanya kesamaan dalam berkomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. “Mudah-mudahan setelah dibangun maka ada penambahan penduduk sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi,” pungkas Feriandi.



SI ALGORITMA

"Nah ini dia. Baru saja tadi saya obrolin di aplikasi chatting nih, tiba-tiba muncul di linimasa medsos. Namanya juga rezeki. Pucuk dicinta ulam tiba. Dapat informasi yang pas di depan mata saat dibutuhkan."

"Wah, alig nih, si pesbuk tau aja apa yang gw butuhin tanpa diminta. Ga kaya si embah yang harus diinput dengan keyword."

"Lah gw komen di status orang doang, ga mau beli barang yang mereka debatin, kok terus kena bombardir iklan barang-barang sejenis?"

"Kok berita di linimasa isinya itu-itu mulu? Perasaan gak trending-trending amat? Ya gw suka sih topiknya kebetulan emang doyan, tapi ya masa topik itu doang yang muncul? Kaya ga ada topik lain di dunia ini."

"Orang itu memang bahlul. Apa dia nggak bisa lihat bahwa semua orang dan pendapat di medsos mendukung jagoan gw? Jagoan dia ga pernah tuh muncul di linimasa gw."

Mungkin kita pernah memergoki suara-suara tersebut berdentung di sekitar kita. Atau malah justru pernah merasakan "hype" yang sama.

Kemungkinan besar semua dari kita memang pernah terpapar permainan algoritma di media sosial seperti itu. Meski mungkin tidak menyadari. Tidak merasakan. Sebagian besar malah tidak sadar sedang "dipermainkan" fokusnya oleh algoritma yang mengatur informasi apa yang terhidang untuk kita nikmati di media sosial.

Medsos dulunya, pada masa awal-awalnya, praktis hanya merupakan penyajian *timeline*, benar-benar hanya menyuguhkan linimasa sebagai kronologi status yang diposting oleh *peer* atau lingkaran pertemanan kita. Pada masa yang embrional tersebut, medsos hadir untuk mawadahi kebutuhan orang yang ingin “*show off*” atas tingkah lakunya agar diketahui masyarakat luas.

Memang mereka bisa pamer di status aplikasi perpesanan. Ingat bahwa di aplikasi *instant messaging* awal seperti Yahoo! Messenger, selain peduli dengan *chat*, pengguna juga suka *ngintip* status yang ada di sebelah *nickname* pengguna. Bahkan “status” ini lebih efektif untuk memberi kode, baik keras maupun halus, ke lebih banyak orang, tanpa harus terasa seperti sengaja memberi info langsung secara personal.

Aplikasi seperti WA pun saat ini masih memiliki fitur tersebut. Dengan fungsi memberi kode yang sama. Kita masih bisa *ngintip* atau pamer halus di status WA. Namun mungkin bagi sebagian besar orang, “*show off*” di kolom status seperti ini masih kurang leluasa pergerakannya. Di medsos, ruang terbuka luas, termasuk untuk *meng-insert* dengan gambar dan video. Di medsos unjuk tampilan bisa dilangsungkan. Lomba cantik-cantikan. Di medsos pula apa yang ditampilkan bisa “*disetir*”, dimanipulasi, baik oleh pengguna maupun oleh penguasa aplikasi.

Algoritma untuk mengatur, menyetir, atau memanipulasi tersebut membuat sebuah aplikasi medsos lebih bisa menyuguhkan informasi sesuai dengan minat atau ketertarikan. Baik minat penggunaanya atau “minat” dari penguasa di belakang aplikasi super tersebut.

Si algoritma peminatan lah yang kemudian juga mengubah lanskap periklanan. Pengguna medsos bisa tidak merasa bahwa apa yang ditampilkan di depannya adalah iklan yang dikamuflase dengan cara

penyajian ala *content marketing*. Jika mereka tahu pun, iklan di medsos akan sangat menggoda karena topiknya memang sangat menyentuh berkat pengaturan algoritma yang sudah mengintip topik-topik yang mereka minati hasil *meng-capture* apa yang dibaca, diklik, ditonton, dan ditulis di media tersebut. Atau bahkan hasil *capture* dari media sosial dan layanan perpesanan lain, yang dipindahkan ke media tersebut, baik legal maupun ilegal.

Tak heran jika dunia periklanan di media mengalami disrupsi hebat. Dari media massa konvensional ke media online. Setelah itu ke media sosial. Pada pengiklanan di media sosial, orang akan mendapatkan insight dan penargetan pasar yang lebih tajam dan juga monitoring hasil campaign yang lebih terukur.

Dengan cara yang sama, algoritma juga telah berperan membuat dunia yang *post-truth* seperti sekarang. Opini dan informasi digelontorkan agar membentuk sebuah kebenaran yang dipaksakan. Teknik *firehose of falsehood*, atau *firehosing* adalah istilah untuk teknik tersebut, yaitu teknik menggelontorkan pesan dan informasi secara masif, repetitif, dan terus menerus, melalui berbagai kanal yang tersedia. Teknik ini makin mendapat kemudahan diterapkan dengan hadirnya medsos. Persis seperti namanya, *firehosing*, proses propaganda itu dilakukan laksana penyemprotan air dengan selang pemadam kebakaran yang kudu banyak volumenya dan terus menerus.

Hanya saja, seharusnya informasi di medsos adalah air yang digentorkan yang sangat dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran. Untuk meredam negativisme dan kebohongan di medsos, Namun dalam praktiknya, justru informasi yang disemprotkan adalah bensin, yang justru makin memperbesar jilatan api yang telah membakar. Diperlukan agen-agen untuk mengubahnya menjadi *firehose of truehood*.***



Oleh: FX Bambang Irawan
Redaktur KominfoNext



Percepatan transformasi digital memaksa masyarakat untuk melek teknologi dan memacu pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur serta ekosistem teknologi informasi hingga ke pelosok tanah air. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi bertujuan untuk memperkecil disparitas layanan internet di Indonesia. Menurut data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Sebanyak 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah non-3T.





Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang dilaksanakan BAKTI Kominfo bekerjasama dengan operator telekomunikasi yaitu pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan menggunakan pendekatan teritorial (wilayah). Proyek ini ditargetkan akan selesai pada akhir 2022. Hadirnya BTS di wilayah tersebut, diharapkan akan membantu masyarakat dalam mengakses jaringan telekomunikasi sinyal 4G untuk dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Percepatan pembangunan BTS merupakan pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia, wilayah 3T menjadi prioritas untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Menjaga kedaulatan negara pada wilayah terluar NKRI, menjadi perhatian tinggi dalam setiap aspek pembangunan nasional Indonesia. Selain itu, layanan digital dapat meningkatkan kualitas hidup bersama baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi bagi masyarakat.





KOMINFO TALK

EPISODE

5 Tahun ke Depan, Mau Kemana Kita?



Arifin Saleh Lubis
Kepala Biro Perencanaan
Kemkominfo



Mulya Amri
Urban Planning
and Public Policy Specialist

Pandemi COVID-19 telah memunculkan aktivitas daring dan mendorong akselerasi percepatan transformasi digital, sebagai salah satu pilar kebijakan utama Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam juga telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi

dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi.

Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk secara optimal melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Kominfo melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif.

“Hal ini tercermin di dalam tiga tujuan strategis Kominfo yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong

“

Hal ini tercermin di dalam tiga tujuan strategis Kominfo yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

Arifin Saleh Lubis, Kepala Biro Perencanaan dalam bincang online Kominfo TALK edisi kelima yang bertajuk “5 Tahun Kedepan, Mau Kemana Kita?”, Kamis (27/05/2021).

yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik," tutur Kepala Biro Perencanaan, Arifin Saleh Lubis. Kepala Biro Perencanaan Arifin mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut dalam lima tahun ke depan, Kominfo menetapkan 4 pilar transformasi digital yakni infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Menurut Arifin, Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, kata Arifin, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di 12.548 desa yang belum terlayani termasuk di lokasi layanan publik.

"Jadi, sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menteri, pembangunannya ingin dipercepat, dan pembangunannya akan ditempatkan untuk daerah-daerah *blankspot* yang menjadi tugas BAKTI di daerah 3T itu sekitar 9.113 desa dan itu akan dituntaskan di tahun 2022," jelasnya. Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Kominfo menyelenggarakan program penyediaan akses *broadband* nasional, khususnya di wilayah non-komersial, antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan *backbone* nasional, serta penyediaan BTS dan akses internet.

"Sementara di wilayah komersial akan dibangun oleh operator seluler. Jadi kalau mereka melihat *margin*, itu nggak layak untuk mereka berbisnis. Operator itu sesuai dengan peraturan perundangan, maka dikenakan biaya yaitu *Universal Service Obligation* (USO). Jadi besarnya 1,25% dari net bruto itu kita kumpulkan," jelasnya.

Hingga saat ini, Kominfo sudah membangun 7.634 titik lokasi internet gratis di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat-masyarakat agar bisa memanfaatkan ruang digital itu dengan baik.

Menurut Kepala Biro Perencanaan Kominfo, kebutuhan infrastruktur BTS sebanyak 9.113 merepresentasikan wilayah Indonesia yang sangat luas. Artinya, lebih dari setengah wilayah daratan dan lautan Indonesia. "Karenanya tugas

BAKTI ini bukan tugas yang mudah, bayangkan mereka harus melewati lembah, bukit, jurang, hutan, sungai untuk membangun infrastruktur digital. Tetapi, tugas ini bukan tugas yang tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Kepala Biro Perencanaan Kominfo menyebutkan, infrastruktur telekomunikasi satelit yang dimiliki Indonesia saat ini sebanyak 9 satelit dengan kapasitas tidak kurang dari 50 Mbps. "Dan itu saja belum cukup dalam mendorong kecepatan internet dan *coverage* wilayah kerja, wilayah layanan di seluruh Indonesia kita masih membutuhkan kapasitas satelit yang sangat besar," jelasnya.

Oleh karena itu, di tahun 2023 akhir nanti BAKTI Kementerian Kominfo bersama mitra kerja akan meletakkan satu *High Throughput Satellites* dengan kapasitas 150 GB Mbps di slot orbit. "Yang diharapkan akan melayani tidak kurang dari 150,000 titik layanan publik di seluruh Indonesia baik untuk kepentingan pendidikan, layanan pemerintah desa, layanan kesehatan dan layanan-layanan publik lainnya termasuk Kamtibmas yang juga nanti harus ditingkatkan kapasitasnya," ungkap Arifin.

Arifin mengatakan, melalui pilihan teknologi satelit tambahan akan mendorong dan meningkatkan kecepatan layanan akses internet di wilayah-wilayah layanan publik di seluruh Indonesia.



Bangun Ekosistem yang Aman

Untuk prioritas kedua, menurut Kepala Biro Perencanaan Arifin, Kementerian Kominfo membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan berdaulat dengan mengupayakan berbagai kebijakan pengembangan teknologi.

“Kebijakan penambahan dan penataan frekuensi, dengan target capaian kebutuhan tambahan spektrum frekuensi 1.310 MHz terpenuhi pada akhir tahun 2024 termasuk juga untuk mendukung inisiatif pengembangan 5G,” jelasnya.

Selain itu, Kominfo berfokus untuk mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

“Kita sedang menyiapkan digitalisasi penyiaran, di Undang-Undang Cipta Kerja batasnya adalah 2 November 2022. Jadi, semua TV Analog akan beralih ke TV Digital. Dengan beralih ke digitalisasi penyiaran, masyarakat mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik,”

Di lain sisi, pemerintah juga nantinya akan mendapatkan benefit melalui digitalisasi penyiaran ini, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap frekuensi yang dilelang dari sistem analog penyiaran.

“Di lain sisi, kita juga mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Jadi, mereka juga diharapkan menjadi lokomotif, sekarang teman-teman mungkin sudah paham ya, terutama yang di frekuensi, sudah beberapa provinsi sudah ada beberapa siaran baik itu TV MNC, operator-operator Lembaga Penyiaran Swasta (LPS),” papar Kepala Biro Perencanaan.

Arifin menambahkan, Kementerian Kominfo juga tengah membangun Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional, untuk menyediakan layanan *monitoring quality of service* (QoS) dan *quality of experience* (QoE) melalui pengukuran *real-time* dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang jauh lebih optimal.

Kembangkan Talenta Digital

Kebijakan prioritas selanjutnya berkaitan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital.





“Kominfo menyelenggarakan program ini untuk mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan. Program seperti Program 1000 Startup Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional,” tutur Arifin.

Selain itu, sambungnya, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program UMKM Go Online yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri onboard ke marketplace, dan Program Petani Nelayan Go Online yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi.

Menyoal upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, Arifin menyebut, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Selain itu, Kominfo berkontribusi menyiapkan SDM nasional di lingkup industri maupun pemerintahan untuk bisa *shifting* di era digital, dengan memberikan pelatihan Digital Talent. Secara nasional, lanskap digital terus berevolusi dan berbagai upaya besar serta terarah dibutuhkan untuk mendorong perkembangan digital khususnya pada sektor publik dan swasta di Indonesia.

Kominfo juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK.



Bangun Pusat Data Nasional

Pada bidang pemerintahan dan stabilitas pertahanan keamanan, Kemenkominfo secara aktif memiliki peran untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi.

“Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Satu yang sudah ditetapkan adalah di lokasi *data center* di Bekasi. Mudah-mudahan, ada lokasi lain dipilih jika memang dibutuhkan,” kata Kepala Biro Perencanaan.

Pemilihan bakal lokasi *data center*, didasarkan keunggulan atas kelengkapan infrastruktur penunjang, semisal infrastruktur serat optik, pasokan listrik, air, serta jalur langsung ke tulang punggung internet global.

“PDN diharapkan dapat memberi sumbangsih besar dalam rangka tata kelola data nasional, jadi dalam membangun Data Center Nasional ada beberapa persyaratan utama yang perlu diperhatikan sesuai dengan standar *Telecommunications Industry Association* (TIA) yang meliputi pemilihan lokasi, kondisi alamnya, infrastruktur, dan sebagainya,” papar Arifin.

Arifin melanjutkan, pusat data yang akan dibangun pemerintah nantinya memiliki spesifikasi Tier 4 dengan kapasitas 43 ribu *core* dan 72 *petabytes*. Kehadiran PDN itu akan menggantikan 2.700 *data center* yang saat ini dipakai secara nasional.



Regulasi Data Pribadi dan Fungsi Komunikasi Publik

Dalam perbincangan, Arifin menyampaikan, sebagai regulator Kominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

"Indonesia sedang melakukan proses percepatan beberapa legislasi utama, salah satunya regulasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang saat ini masih berproses di DPR RI," ucap Arifin.

Sedangkan untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

"Namun demikian, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Kominfo saja, melainkan memerlukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang juga berjalan pada lanskap digital yang sama. Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi," tandas Kepala Biro Perencanaan Kominfo. (hm.ys)

Bangkit,

Kita Bangsa yang Tangguh!

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menggalang kembali semangat kebangkitan sebagai bangsa yang tangguh. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan semangat kebangkitan nasional mengajarkan kepada setiap warga negara untuk selalu optimis menghadapi masa depan. Dalam era digital kali ini, semangat kebangkitan nasional menjadi bukti ketangguhan bangsa dalam menghadapi pandemi.



“Bangkit, kita bangsa yang tangguh! Kita hadapi semua tantangan dan persoalan bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa ini, tangguh dalam menghadapi pandemi Covid 19 yang sudah melanda secara global lebih dari setahun ini,” ujarnya dalam sambutan Upacara Bendera Peringatan ke-113 Hari Kebangkitan Nasional di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis (20/05/2021).

beragam tantangan selama masa pandemi.

“Hal ini ditujukan untuk menjaga kesatuan bangsa untuk menjaga kita sebagai suatu kesatuan sebagai bangsa. Mari kita manfaatkan ruang digital secara tepat dan secara bijak. Katakan tidak pada segala jenis hoaks, jenis ujaran kebencian, dan berbagai jenis penyalahgunaan ruang digital yang mencederai semangat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan ekonomi secara khusus ekonomi digital yang berkembang dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Menteri Johnny juga mengajak masyarakat untuk tangguh dalam kebersamaan guna memulihkan ekonomi nasional Indonesia.

Menurutnya, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah ekonomi digital. “Di tengah pandemi bisnis dagang

berbasis digital ini bahkan diproyeksikan tumbuh 33,2% dari tahun sebelumnya tahun 2020 yang mencapai 253 triliun, menjadi 337 triliun pada tahun 2021 ini,” paparnya.

Menurut Menkominfo, peningkatan jumlah transaksi lewat *e-commerce* juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat, serta terus mengakselerasi perkembangan finansial teknologi dan digital banking.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pandemi Covid-19 berhasil memaksa kita untuk mengubah kebiasaan kebiasaan

“

...Mimpi kita untuk tancap gas memacu ekonomi dan kemajuan peradaban sebagai simbol kebangkitan bangsa menuju Indonesia digital, semakin digital, semakin maju,”

kita secara drastis seperti interaksi fisik atau tatap muka di dunia nyata yang berpindah ke dunia virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi,” jelasnya.

Menkominfo menyebutkan dengan adanya pandemi seluruh dunia tanpa sadar melakukan perubahan atau pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan dari non digital menjadi digital. Oleh karena itu, Menteri Johnny menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi titik awal dalam membangun kesadaran untuk bergerak mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

“Hari Kebangkitan Nasional ini mengingatkan kita kepada semangat untuk bergerak sebagai bangsa dengan tanpa memandang perbedaan, suku, agama, ras, dan golongan. Mimpi kita untuk tancap gas memacu ekonomi dan kemajuan peradaban sebagai simbol kebangkitan bangsa menuju Indonesia digital, semakin digital, semakin maju,” ungkapnya.

Menteri

Johnny mengajak seluruh warga negara untuk bersiap siaga dalam menghadapi ancaman gelombang baru pandemi Covid-19. “Sembari bersiaga menghadapi ancaman gelombang baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan,” tandasnya.

Selain itu, pada saat bersamaan Menkominfo mengimbau agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Terutama dalam menghadapi beredarnya disinformasi, misinformasi, malinformasi dan hoaks, Menkominfo mengajak masyarakat untuk tangguh dalam menghadapi

TIGA AGENDA KONTEKSTUAL



Melalui momentum bersejarah Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Johnny mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan sivitas Kementerian Kominfo, merefleksikan tiga hal penting yang menjadi dasar kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, tiga hal yang diretas perhimpunan Budi Utomo pada 113 tahun lalu meliputi: cita-cita untuk memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

“Tiga hal di atas merupakan substansi makna kebangkitan nasional yang harus terus dipertahankan dan diaktualisasikan lintas generasi, senantiasa diterapkan dalam kerangka dinamis sesuai konteks zamannya,” jelasnya.

Menkominfo mengingatkan ketika era pra kemerdekaan kebangkitan nasional mampu menjadi ruh

gerakan perlawanan terhadap hegemoni penjajah. Sedangkan pascakemerdekaan kebangkitan nasional menjadi inspirasi pelaksanaan pembangunan bangsa. Dan pada era reformasi membawa Indonesia menuju pengelolaan negara yang lebih terbuka dan lebih demokratis.

“Dalam konteks ini, makna kebangkitan nasional seyogyanya diarahkan menjadi faktor pemandu untuk mengembangkan demokratisasi di segala bidang, mewujudkan keadilan penegakan hukum, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Inilah agenda kontekstual yang sejatinya lebih dari cukup untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke cita-cita ketiga yang diretas Budi Utomo, berbuat sesuai dinamika kehidupan bangsa saat ini,” ungkapnya restoris.

Menteri Johnny mengisahkan, pada Mei 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menjadikan hari lahirnya



organisasi Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pilihan itu bukan tanpa sebab, menurutnya ketika itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi. Selain itu, Indonesia dalam masa revolusi mempertahankan diri dari Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia.

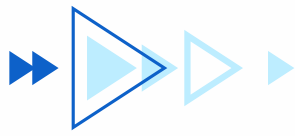
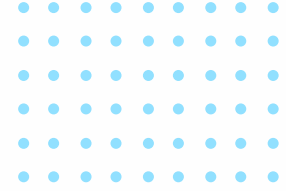
“Dengan harapan, golongan yang saling bertengkar dan rakyat Indonesia melalui momen ini dapat mengumpulkan kekuatan bersatu melawan penjajah, melawan Belanda. Presiden Soekarno berharap penetapan Hari Kebangkitan Nasional bisa mencegah perpecahan saudara-saudara sebangsa dan setanah air,” paparnya.

Namun demikian, Menkominfo menegaskan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini bukan

sekadar menjadi ritual untuk mengenang kejayaan sejarah masa lalu. “Soliditas persatuan era Budi Utomo yang terbentuk dengan semangat Dokter Sutomo dan kawan-kawan itu perlu diwujudkan dalam praktik berbangsa dan bernegara yang lebih operasional,” ujarnya.

Upacara yang berlangsung dengan menerapkan *physical distancing* itu dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I) dan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kementerian Kominfo. Sementara, sebagian sivitas Kementerian Kominfo ada yang mengikuti upacara secara langsung di tempat, adapula yang menyaksikan melalui konferensi video dari rumah masing-masing. Prosesi upacara juga disiarkan langsung kanal YouTube Kemkominfo TV.

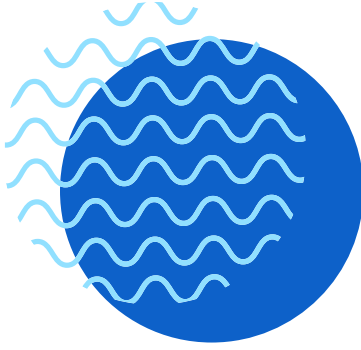




Kominfo

Imbau Operator Seluler Jaga Kualitas Telekomunikasi





Guna melaksanakan mudik Idul Fitri 1442 H secara daring, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau seluruh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia (Telkomsel, Indosat, XL Axiata, H3I, Smartfren, dan Net1 Indonesia) untuk menjaga kinerja jaringan telekomunikasi dan tetap memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya.

Selain itu, Kominfo juga meminta penyelenggara telekomunikasi melakukan antisipasi dan optimalisasi jika terjadi lonjakan trafik dengan mengerahkan *mobile* BTS dan penambahan kapasitas jaringan seluler.

Oleh karena itu, guna memonitor kualitas jaringan, Koordinator Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Ditjen PPI, Indra Apriadi mengatakan keenam operator seluler itu pun telah menyatakan komitmennya untuk menyiagakan *Network Operation Center* (NOC) yang beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari.

Indra mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, seluruhnya menerapkan kebijakan yang berbeda-beda. Telkomsel misalnya, menerapkan empat langkah antisipatif, yaitu penyediaan jaringan *broadband* untuk memastikan konektivitas digital yang prima guna melayani kebutuhan komunikasi masyarakat selama musim mudik lebaran digital.

"Optimalisasi saluran digital untuk jaminan ketersediaan produk dan layanan, program loyalitas dan promo paket layanan digital bagi pelanggan setia, program *Corporate Social Responsibility*, serta terdapat Gerai Grapari yang tetap beroperasi dengan normal sesuai jam operasional di masing-masing wilayah," ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (19/05/2021).

Untuk operator Indosat, kata Indra, pemantauan kondisi jaringan telekomunikasi melalui *Indosat Ooredoo Network Operation Center* (iNOC) dan *Indosat Service Operation Center* (i-SOC)

sebagai pusat *monitoring* seluruh jaringan. "Jadi, berdasarkan pemantauan Kominfo, Indosat akan menyiapkan *mobile* BTS sesuai kebutuhan. Kemudian, *Operational Command Centre* Indosat beroperasi sebelum dan setelah Lebaran," terang Indra.

Lebih lanjut, Indra mengatakan, XL Axiata menyiapkan kapasitas jaringan lebaran mengikuti *trend* lebaran dan pola libur panjang sebelumnya. Di samping itu, melakukan antisipasi dan menjaga kinerja jaringan telekomunikasi serta mengerahkan *mobile* BTS untuk mendukung layanan jaringan.

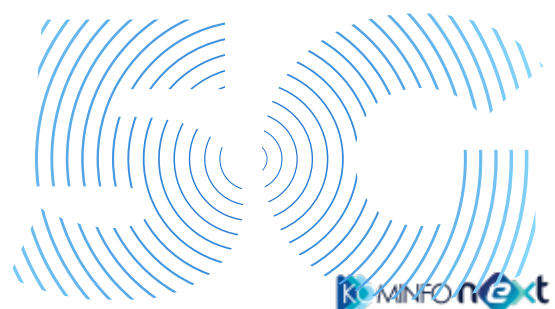
Adapula H3I atau lebih dikenal dengan *Three* Indonesia, yang memberikan fasilitas layanan pelanggan melalui 3 Store dengan jam operasional mulai 08.00 s.d 19.00 WIB selama seminggu penuh, untuk membantu pengguna selama periode musim lebaran.

"H3I menyampaikan kesiapan mereka untuk menambah kapasitas pada 4G BTS, mengerahkan *mobile* BTS untuk mendukung layanan jaringan, juga optimalisasi jaringan pada titik penting dan pusat keramaian," paparnya.

Sementara kesiapan dari Smartfren melakukan monitoring jaringan *eksisting*, mempersiapkan *Team Task Force* lapangan, serta memonitor NOC. Sedangkan Net1 Indonesia berkomitmen menjaga *availability* jaringan seperti yang dilakukan dalam pemantauan jaringan terkait Covid-19.

Sebagai tindak lanjut dari laporan yang diberikan oleh enam penyelenggara telekomunikasi tersebut, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika melakukan pengukuran kualitas layanan seluler di wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya seperti Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Untuk rekapitulasi pengukuran QoS Area Jabodetabek, dapat dilihat melalui tabel di halaman berikut.





Jenis Pengujian	Parameter Pengujian	Penyelenggara Jaringan Seluler					
		H3I	ISAT	SF	TSEL	XL	STI
Total Voice Call	Call Attempts	101	96	89	88	99	////////
	Blocked Call	44	26	24	16	38	////////
	Dropped Call	3	1	0	2	1	////////
	Success Call (%)	53,47	71,88	73,03	79,55	60,61	////////
	Dropped Call (%)	2,97	1,04	0,00	2,27	1,01	////////
	Call Setup Time (s)	10,99	10,16	3,35	7,69	9,11	////////
	Mean Opinion Score (MOS)	3,84	3,75	3,82	3,92	4,00	////////
Whatsapp Call	Call Attempts	101	98	96	95	100	////////
	Success Call (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	////////
	Dropped Call (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	////////
	Call Setup Time (s)	1,92	1,83	2,16	1,93	2,05	////////
	Mean Opinion Score (MOS)	4,09	4,21	3,96	4,17	3,98	////////
Whatsapp Messaging	Message Attempts	157	155	157	155	155	////////
	Message Send	147	154	153	153	152	////////
	Message Failed	10	1	4	2	3	////////
	Message Received	42	117	128	119	118	////////
	Success Rate (%)	27	76	82	77	76	////////
SMS	SMS Attempts	52	36	52	44	44	////////
	SMS Success	29	27	44	37	34	////////
	SMS Delivered (< 3 menit)	21	21	43	37	33	////////
	%SMS Delivered (< 3 menit)	72,41	77,78	97,37	100,00	97,06	////////
	SMS Delivered (Average Sec)	0,65	0,65	0,40	0,52	0,58	////////
HTTP Browsing (https://www.kominfo.go.id)	HTTP Download Attempts	7,67	9,67	8,44	9,33	9,00	5,67
	HTTP Download Success	6,00	8,67	6,22	8,22	6,89	4,00
	HTTP Download SR (%)	78,26	89,66	73,68	88,10	76,54	70,59
	Avg HTTP Throughput (Mbps)	3,65	3,97	2,79	3,14	3,35	1,01
Video Streaming by YouTube	Video Attempts	88	91	89	91	91	27
	Video Success	64	78	61	80	73	15
	Stream Success Rate (%)	72,73	85,71	68,54	87,91	80,22	55,56
	Jerkiness (%)	4,55	1,37	3,83	5,14	0,51	9,28
	Avg Freezing (%)	4,38	1,26	3,96	4,92	0,22	9,81
	Avg Freezing (s)	1,65	0,48	1,24	1,66	0,09	3,96
	Avg Visual Quality / MOS	3,48	3,73	3,52	2,71	3,61	3,18
FTP Download	FTP Download Attempts	68	84	71	82	78	14
	FTP Download Success	53	71	48	71	55	8
	FTP Success Rate (%)	77,94118	84,53281	67,60563	86,58537	70,51282	57,14286
	Avg Download Throughput (Mbps)	2,17	3,38	2,56	2,56	2,89	0,88
FTP Upload	FTP Upload Attempts	68	85	72	82	81	15
	FTP Upload Success	54	75	51	74	67	9
	FTP Success Rate (%)	79,41176	88,23529	70,83333	90,2439	82,71605	60
	Avg Upload Throughput (Mbps)	11,74	14,22	-	10,52	8,12	0,81



Uji Layanan untuk Lebaran Berkualitas

Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mempertahankan kualitas jaringan dan menyiapkan jaringan cadangan yang andal selama Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1442 H. Kominfo juga akan memantau pengalaman pelanggan dalam menggunakan sejumlah aplikasi seperti Whatsapp dan YouTube untuk mengukur kualitas jaringan yang diberikan penyelenggara telekomunikasi kepada pelanggan.

Menteri Johnny mengatakan, parameter yang diukur Kominfo berupa kecepatan unduh/unggah, penggunaan dua aplikasi itu dan lain sebagainya. Menurutnya, parameter tersebut dipilih karena kedua aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang paling populer di masyarakat. "Parameter uji antara lain meliputi *Download/Upload Throughput* [Mbps], *Latency* [ms], *Whatsapp Call Success Rate* [persen], *Whatsapp Mean Opinion Score* [MOS], *Youtube Stream Success Rate* [persen] dan *Youtube Visual Quality* [MOS]," tuturnya, Senin (12/04/2021).

Oleh karena itu, sebagai upaya mitigasi terjadinya gangguan jaringan, Kominfo meminta penyelenggara telekomunikasi untuk memeriksa dan menyiapkan jaringan *redundancy* secara rutin selama Ramadhan dan Lebaran, pengecekan ketersediaan suku cadang

dan *consumable*, serta membangun posko siaga. "Dikhawatirkan gangguan seperti cuaca ekstrem dan bencana alam akan membuat kualitas jaringan penyelenggara telekomunikasi menurun, bahkan menghilang. Untuk itu, Kominfo akan meminta laporan dari penyelenggara telekomunikasi terkait jumlah keluhan secara periodik beserta solusi penanganannya," kata Menkominfo.

Menkominfo memaparkan, dalam hal terjadi gangguan terkait dengan kapasitas jaringan, Kominfo meminta penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya perbaikan seperti menyiapkan *mobile* BTS, penambahan kapasitas BTS, penambahan kapasitas transmisi atau penambahan kapasitas inti jaringan. Selain mendorong operator untuk mempersiapkan jaringan yang andal, pihaknya juga akan melakukan pemantauan dan pengukuran kualitas layanan (*Quality of Service*) secara rutin dan meminta seluruh opsel melakukan monitoring jaringan telekomunikasi melalui *Network Operation Center* (NOC) yang beroperasi selama 24 jam 7 hari.

Ia menyebut, Kominfo juga melakukan kegiatan *monitoring* kualitas layanan telekomunikasi selama masa pandemi Covid-19 dan PSBB dengan melakukan pengukuran *Quality of Service* (QoS)



layanan suara dan data/internet seluler terhadap operator seluler guna memastikan layanan prima telekomunikasi.

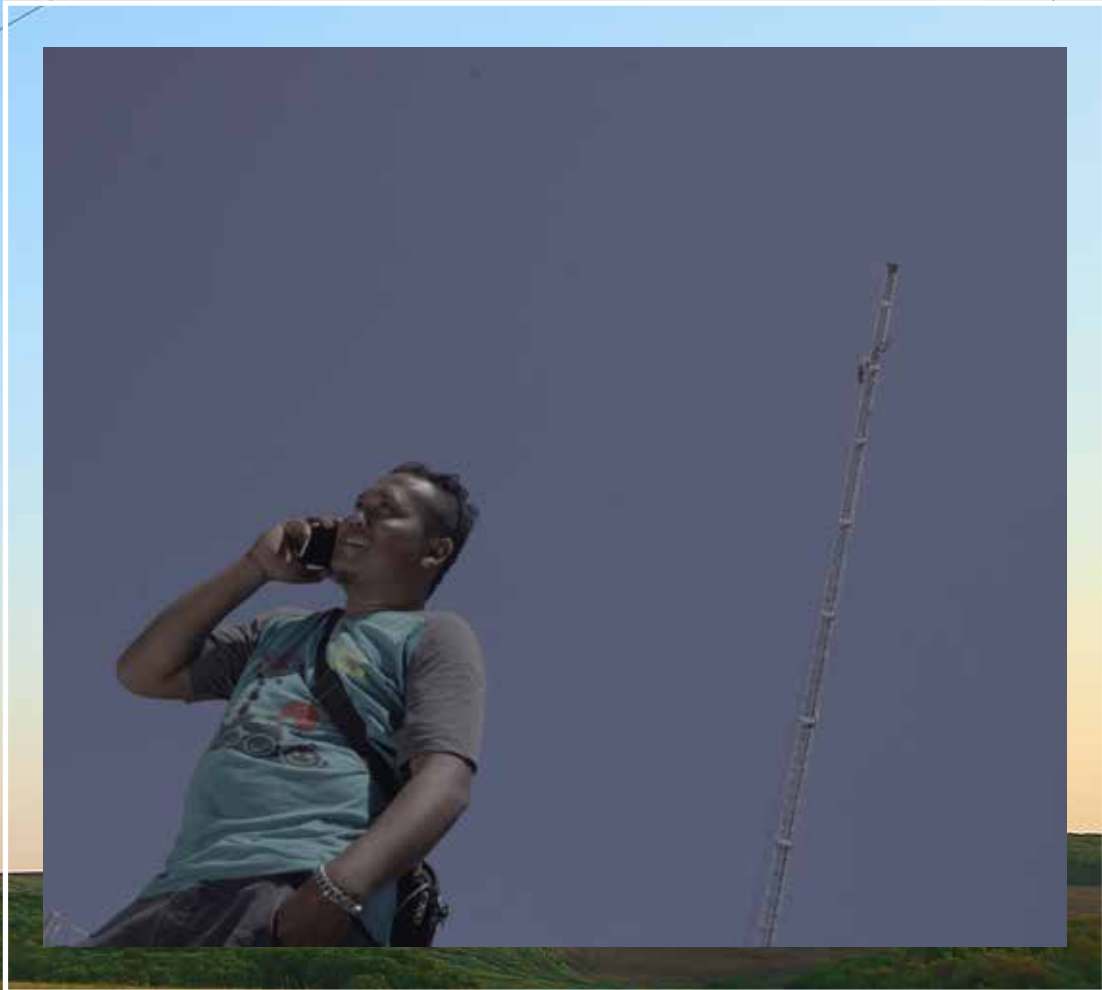
Dalam kesempatan terpisah saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (19/05/2021), JFU Analisis Monitoring Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi Level 3 Ditjen PPI Kominfo, Ria Fistarini mengatakan pemantauan dan pengujian kualitas jaringan telekomunikasi dilakukan demi menjaga kelancaran komunikasi.

“Kami melakukan *monitoring* dan pengukuran *Quality of Service (QoS)*, menginformasikan hasil pengukuran ke operator seluler melalui email resmi, mem-*follow up* informasi terkait dengan layanan seluler yang kurang optimal, dan meminta para opsel meningkatkan kualitas layanan pada daerah yang kurang optimal, serta melaporkan upaya perbaikan yang perlu dilakukan,” jelasnya.

Ria menuturkan, pengukuran dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu *Drive Test* atau metode bergerak yang dilakukan selama 3 (tiga) jam pada setiap kecamatan dan metode diam (*Static Test*) yang dilakukan selama kurang lebih 15 menit pada tiap-tiap titik pengukuran.

Untuk metode *Drive Test* bertujuan guna mengetahui kualitas jaringan secara bergerak di berbagai ruas jalan terutama ketika jam sibuk. Sedangkan pada metode pengukuran *Static Test* dilakukan di beberapa tempat vital, terutama pusat transportasi seperti Bandara, Pelabuhan dan Terminal.

“Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, persentase keberhasilan panggilan menunjukkan hasil kurang baik, sementara untuk kualitas layanan lain sudah cukup bagus,” tutur Ria.



Pada pengukuran layanan *voice*, ungkap Ria, persentase keberhasilan panggil sebesar 55.46 % dengan rata-rata MOS 3.67 (skala 1-5) untuk 5 penyelenggara seluler. Pada layanan SMS, menunjukkan persentase keberhasilan kurang dari 3 menit dengan rata-rata sebesar 88,99% untuk 5 penyelenggara seluler.

“Sedangkan untuk pengukuran layanan WhatsApp Call, persentase keberhasilan panggil, rata-rata 61.43% dengan MOS 4,07 (skala 1-5) untuk 5 penyelenggara seluler,” ungkapnya.

Pada layanan video *streaming*, lanjut Ria, nilai rata-rata VMOS untuk *visual quality* sebesar 3,09 (skala 1- 5). Sementara untuk layanan http nilai rata-rata *throughput* sebesar 3.57 Mbps. Layanan FTP *download*, nilai rata-rata *throughput* sebesar 3.68 Mbps. Pada layanan FTP upload nilai rata-rata *throughput* sebesar 8.17 Mbps.

“Hasil pengukuran yang sudah diolah dan dianalisis tersebut, kemudian disampaikan kepada operator seluler apabila terdapat hasil yang kurang baik di suatu titik atau rute pengukuran,” tandas Ria.

Selain itu, untuk memastikan masyarakat dapat menikmati layanan prima telekomunikasi, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI Kominfo juga meminta seluruh operator seluler untuk menyampaikan laporan persiapan operator seluler menjelang lebaran. (hm.ys)

Peluncuran Program

Literasi Digital Nasional



Peluncuran Program Literasi Digital Nasional

Bertepatan dengan Peringatan ke-113 Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional pada Kamis (20/05/2021) sebagai momentum bagi kebangkitan nasional di ruang digital, dengan tujuan untuk mendorong semakin banyaknya talenta anak bangsa semakin cakap dalam menggunakan teknologi digital. Program ini dilakukan secara virtual dan disaksikan serentak oleh masyarakat di ke-34 Provinsi di Indonesia, 514 kota/kabupaten dan disiarkan secara langsung di 16 stasiun TV.

Peluncuran Program Literasi Digital Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Anwar Makarim menyoroti arti penting kecakapan digital yang mencakup kemampuan, kecerdasan dan kebijakan dalam menggunakan gawai. Teknologi yang digunakan secara tepat sasaran dan cakap akan mampu akselerasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan pun memungkinkan personalized learning yang memungkinkan para pelajar untuk memilih ilmu sesuai bidang minatnya.





Peluncuran Program Literasi Digital Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam laporannya menyampaikan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai Percepatan Transformasi Digital Nasional khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital. Program LDN menjadi sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat, di mana saat ini terdapat setidaknya 196,7 juta warganet di Indonesia

Peluncuran Program Literasi Digital Nasional

Menkominfo, Johnny G. Plate (kedua kanan) didampingi Dirjen APTIKA Samuel A. Pangerapan (kanan), Wakil Ketua Siberkreasi Anita Wahid (kedua kiri), dan Aktor Nicholas Saputra (kiri) melakukan penekanan tombol yang menandakan peresmian peluncuran Program Literasi Digital Nasional dari Hall Basket Senayan Jakarta, Kamis (20/5/2021) yang disaksikan serentak oleh masyarakat di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.





Peluncuran Program Literasi Digital Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate didampingi Dirjen APTIKA Samuel A, Pangerapan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Aktor Nicholas Saputra mengunjungi *booth-booth* Literasi Digital Nasional usai peluncuran Program Literasi Nasional yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021)



Peluncuran Program Literasi Digital Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate didampingi Dirjen APTIKA Samuel A, Pangerapan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Aktor Nicholas Saputra mengunjungi booth-booth Literasi Digital Nasional usai peluncuran Program Literasi Nasional yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021)



Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa tantangan di ruang digital makin besar di tengah konten-konten negatif yang terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menurutnya ini menjadi kewajiban bersama pemerintah, pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus meminimalkan konten negatif dengan memperbanyak hadirnya konten-konten positif ke depannya dengan membanjiri konten positif dan edukatif terus-menerus.



Sumber Foto : AntaraFoto

Peniadaan Mudik Cegah Penularan dan Lonjakan Kasus COVID-19

Kebijakan peniadaan mudik kembali diambil pemerintah dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat yang melakukan mobilitas selama libur lebaran. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, masa peniadaan mudik ini berlaku tanggal 6 - 17 Mei 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito menegaskan bahwa kebijakan peniadaan mudik ini berlaku untuk moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. "Berdasarkan fakta yang ada, pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan puasa libur panjang.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sonny B. Harmadi mengatakan bahwa

meningkatnya aktivitas perjalanan akan menciptakan kerumunan. "Kepatuhan protokol 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) akan turut berkurang. Inilah yang memicu lonjakan kasus," ujarnya.

Upaya mengurangi mobilitas penduduk selama masa libur lebaran juga dilakukan dengan melakukan penyekatan dan pengamanan mudik lebaran. Pada masa libur lebaran tahun ini, Polda Metro Jaya membuat 14 pos penyekatan dan 12 pos *checkpoint* di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.

Meskipun pemerintah telah melarang adanya mudik, ternyata masih banyak masyarakat yang tetap nekat dan melakukan berbagai cara agar bisa mudik ke kampung halamannya. Hal ini kemudian yang menjadi alasan bagi pemerintah daerah beserta satgas daerah yang wilayahnya menjadi tujuan arus balik,

bersiaga melakukan *testing* dan *tracing* secara masif terhadap para pemudik yang akan kembali.

Data 15 Mei 2021 dari Polri menyebutkan bahwa di 109 titik penyekatan sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali yang melakukan *rapid test* acak, ditemukan 226 hasil positif dari 77.068 tes yang dilakukan. "Kasus positif temuan di lapangan akan dirujuk ke pusat isolasi mandiri terdekat yang telah disiapkan satgas daerah," jelas Wiku.

Terkait hal ini, Jubir Wiku meminta daerah kabupaten/kota yang masih berada di zona merah untuk segera memperbaiki status zonasinya. "Pasca lebaran, ada potensi lonjakan kasus yang disebabkan adanya momen libur panjang Idul Fitri 1442 H," ujarnya.

Berdasarkan data per 16 Mei 2021 terdapat 7 kabupaten/kota yang masih berkategori zona merah. Jika tidak segera berbenah, dikhawatirkan kabupaten/kota tersebut akan kewalahan

menghadapi dampak dari libur panjang lebaran. Tujuh kabupaten/kota tersebut yaitu Sleman (DIY), Salatiga (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), Pekanbaru (Riau), Solok dan Bukittinggi (Sumatera Barat), dan Deli Serdang (Sumatera Utara).

"Jika saat ini, 7 kabupaten/kota ini sudah berada di zona merah sebelum dampak libur Idul Fitri terlihat, bukan tidak mungkin kabupaten/kota ini akan kewalahan menghadapi kemungkinan kenaikan kasus yang berpotensi dalam dua atau tiga minggu kedepan," tegasnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (20/5/2021).

Di samping itu, per 16 Mei daerah yang masuk zona merah berkurang dari dua belas menjadi tujuh kabupaten/kota, zona oranye berkurang dari 324 menjadi 321 kabupaten/kota, zona kuning (risiko rendah) dari 169 menjadi 177 kabupaten/kota, sementara zona hijau tidak ada kasus baru

dan tidak terdampak, jumlahnya tetap, masing-masing sebanyak 8 kabupaten/kota.

Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) karena minggu ini ada 37 kabupaten/kota yang keluar dari zona oranye. Kabupaten/kota itu tersebar di Aceh (2), Sumatera Utara (4), Jambi (3), Sumatera Selatan (2), Bengkulu (2), Lampung (2), DKI Jakarta (1), Jawa Timur (6), NTT (5), Kalimantan Barat (1), Kalimantan Utara (1), Sulawesi Barat (1), Maluku (2), Papua (4), dan Papua Barat (1).

Meski demikian Jubir Wiku menjelaskan bahwa kesiagaan menghadapi apapun yang terjadi kedepannya merupakan kunci dalam merespon perubahan secara cepat. Sehingga kondisi apapun dapat dikendalikan.

"Perketat kembali pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan serta memaksimalkan skrining dan *testing* terutama pada warga yang baru pulang dari bepergian." jelas Wiku.

Diolah dari covid19.go.id



Sumber Foto : AntaraFoto

Peringatan ke-113 Harkitnas, Menkominfo: Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh!

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menggalang kembali semangat kebangkitan sebagai bangsa yang tangguh. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan semangat kebangkitan nasional mengajarkan kepada setiap warga negara untuk selalu optimis menghadapi masa depan. Dalam era digital kali ini, semangat kebangkitan nasional menjadi bukti ketangguhan bangsa dalam menghadapi pandemi.

“Bangkit, kita bangsa yang tangguh! Kita hadapi semua tantangan dan persoalan bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa ini, tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah melanda secara global lebih dari setahun ini,” ujarnya dalam sambutan Upacara Bendera Peringatan ke-113 Hari Kebangkitan Nasional di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis (20/05/2021).



Ibaratkan Rumus Telekomunikasi, Sekjen: Silaturahmi Punya Efek Eksponensial



Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan esensi dasar silaturahmi lewat Halal Bihalal memiliki efek seperti penerapan Hukum Metcalfe dalam pemanfaatan jaringan telekomunikasi. Mengutip artikel yang mengupas keterkaitan isu silaturahmi dengan Hukum Metcalfe, Sekjen Kementerian Kominfo

menjelaskan nilai dari suatu jaringan telekomunikasi akan tumbuh secara eksponensial.

“Halal Bihalal mengajak kita untuk saling memaafkan sambil bersilaturahmi. Menariknya, silaturahmi dapat dikatakan sebagai rumus dasar dari jaringan telekomunikasi yang juga relevan untuk platform digital. Tepatnya akan tumbuh sebesar kuadrat dari jumlah pengguna yang terhubung ke dalam jaringan tersebut sehingga semakin banyak penggunaannya akan semakin tinggi nilai jaringan tersebut. Begitu pula dengan menyambung silaturahmi yang merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam,” tuturnya dalam Halal Bihalal Lebaran Digital Keren yang berlangsung tatap muka terbatas dan virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (17/05/2021).

Terbitkan ULO, Menkominfo: Indonesia Segera Masuki Era 5G



Indonesia akan segera memasuki era baru teknologi telekomunikasi modern 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Layanan 5G kepada PT Telkomsel.

“Pada tanggal 21 Mei 2021 kemarin, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Terbitnya SKLO untuk salah satu operator seluler ini menandai satu perkembangan signifikan (*milestone*) dalam upaya penggelaran teknologi 5G di Indonesia,” jelasnya dalam Konferensi Pers tentang Dimulainya Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 5G Berbasis Teknologi IMT-2020 (International Mobile Telecommunications-2020) pada Pita Frekuensi 2300 MHz di Indonesia dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).

Tonggak Penting Infrastruktur Digital, Jaringan 4G dan 5G Berjalan Simultan

Indonesia telah memasuki babak baru teknologi telekomunikasi modern dengan memanfaatkan jaringan koneksi generasi kelima (5G). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan infrastruktur digital nasional akan ditopang dengan jaringan 4G dan 5G secara simultan.

“Saya ingin memastikan roll out 5G Telkomsel yang dilakukan hari ini juga tetap berjalan operasi simultan bersama jaringan 4G, karena pembangunan 5G secara merata di seluruh wilayah tanah air justru yang akan menjadi tonggak-tonggak penting infrastruktur telekomunikasi nasional kita,” ujarnya dalam peresmian 5G Telkomsel, di Vertical Garden the Telkom Hub, Jakarta, Kamis (27/05/2021).



Kembali Gelar AJK, Kominfo Ajak Insan Pers Wujudkan Indonesia Terkoneksi

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggelar Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) tahun 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan, lomba tahunan yang telah digelar sejak 2018 itu sebagai bentuk apresiasi kepada jurnalis di seluruh Indonesia atas kontribusi meliput di sektor Kominfo.

“Sebagai bagian dalam kolaborasi pentahelix nasional kita, jurnalis memiliki peran vital. Oleh sebab itu, saya mengajak rekan-rekan insan pers di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi, menyumbang ide dan gagasan terbaiknya melalui Anugerah Jurnalistik Kominfo atau AJK 2021,” ujarnya dalam kegiatan Launching AJK 2021 secara virtual, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (25/05/2021).



Industri Game Tumbuh Pesat, Perlu Edukasi Terhadap Pengguna

Pengguna game perlu mendapat pemahaman cara bermain yang benar dalam menghadapi pesatnya peredaran game. Menurut Peta Ekosistem Industri Game Indonesia 2020, produksi game selalu naik di tiga tahun terakhir.

“Butuh pemahaman yang baik akan industri game ini. Kami mendorong *developer/publisher* game selain mempromosikan produk, juga melakukan edukasi kepada penggunanya,” jelas Koordinator Business Matchmaking Ditjen Aptika, Luat Sihombing saat acara Tok Tok Kominfo dengan tema Kepoin Perkembangan e-Sport di Indonesia, Jumat (07/05/2021).

Ditjen Aptika, lanjut Luat, secara paralel juga akan melakukan literasi melalui semua saluran informasi yang dimiliki, seperti regulasi, pedoman, dan pemeringkatan. “Kami informasikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain game, seperti waktu bermain dan batasan usia,” tandasnya.



Migrasi TV Analog ke Digital, Dirjen PPI: Masyarakat Dapat Layanan Lebih Baik

Migrasi siaran televisi dari analog ke digital akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli menyatakan peralihan itu akan membuat masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan televisi berupa gambar yang lebih bagus, lebih jernih, lebih canggih dan lebih bersih.

Sementara dari aspek frekuensi, ketika masyarakat beralih ke digital akan ada penghematan frekuensi di frekuensi 700 MHz. "Selama ini kan masyarakat menggunakan frekuensi yang sangat boros ketika menggunakan analog dan frekuensi itu bisa digunakan untuk kepentingan *broadband* supaya akses jaringan internet lebih cepat, lebih canggih, dan juga masyarakat bisa menikmati layanan telekomunikasi dengan *quality of service* yang jauh lebih bagus," jelasnya dalam Program Apa Kabar Indonesia Malam TVOne "Semangat Digitalisasi Penyiaran TV", dari Jakarta, Senin (10/05/2021).

Kominfo Terapkan KSO untuk Sediakan Layanan 4G di 7.904 Lokasi 3T

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan kerja sama operasi (KSO) bersama perusahaan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia. Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo, Anang Latif menyatakan, KSO itu sebagai langkah lanjutan memastikan tersedianya suplai sinyal 4G di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

"BAKTI Kominfo sedang melalui proses penetapan kerja sama operasi dengan perusahaan operator seluler yang

memiliki lisensi di Indonesia. Seleksi penyedia layanan seluler untuk BTS 4G di wilayah 3T ini tidak kalah pentingnya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Kualitas layanan seluler yang menjangkau hingga pelosok nusantara menjadi ujung tombak hajat besar percepatan transformasi digital nasional," jelasnya dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan Layanan Seluler pada BTS 4G di Wilayah 3T di Jakarta, Jumat (28/05/2021).



Nelayan Batulicin Akui Mudahnya Urus ISR secara Online

Banjarmasin (SDPPI) – Baharuddin, nahkoda kapal nelayan di perairan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim yang diurusnya secara *online* dan diserahkan langsung oleh Sanusi, Plt Kasubbag TU Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin (Balmon Banjarmasin), Jumat (21/5/2021). Selama proses pengurusan, tidak ada sedikitpun biaya yang dikenakan. Atas semua kemudahan itu, Baharuddin mengajak semua nelayan untuk turut mengajukan permohonan ISR guna melengkapi legalitas perizinan penggunaan frekuensi radio komunikasi keselamatan pelayaran.

Sementara itu dalam siaran persnya, Kepala Balmon Banjarmasin Mujiyo menjelaskan di wilayah kerjanya, Balmon Banjarmasin telah lima kali menerbitkan ISR Maritim, sementara beberapa permohonan lainnya sedang dalam proses penerbitan. Kepala Balmon mengingatkan kepada para nelayan agar perangkat radio yang digunakan sesuai dengan peruntukan maritime "Jangan menggunakan perangkat amatir atau yang *allband*. Nelayan wajib memiliki sertifikasi resmi dari Kemkominfo," tegas Mujiyo.



10 Hoaks Terpopuler Mei 2021



1 [HOAKS] 10 Dokter Wafat karena COVID-19 dalam Waktu 24 Jam setelah Disuntik Vaksin

Beredar informasi melalui broadcast WhatsApp yang mengabarkan adanya 10 dokter meninggal karena COVID-19 dalam waktu 24 jam, di mana mereka disebutkan meninggal meski sudah disuntik vaksin COVID-19.

Faktanya, berdasarkan hasil penelusuran gridhealth.id, kesepuluh nama dokter yang disebutkan dalam pesan tersebut memang benar meninggal karena COVID-19, namun tidak meninggal bersamaan dalam kurun waktu 24 jam. Lima nama dokter pertama diketahui meninggal di bulan September 2020 lalu, sementara sisanya diketahui meninggal di bulan Desember 2020. Sedangkan, kabar mengenai 10 dokter tersebut meninggal walau sudah disuntik vaksin COVID-19 adalah keliru. Pasalnya pada rentang waktu tersebut, program vaksinasi COVID-19 belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah baru memulai vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat pada 13 Januari 2021.



2 [HOAKS] Aplikasi Higgs Domino Island akan Diblokir Permanen oleh Kominfo

Beredar informasi berisi Pengumuman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Nomor: 2087/KOMINFO/SJ/KP.03.01/11/2019 tentang Pemblokiran Aplikasi Higgs Domino Island melalui Play Store dan Browser pada 26 Mei 2021.

Namun hal ini dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dedy Permadi yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan Kominfo tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut.



3 [HOAKS] Subsidi Pulsa 200 Ribu dan Kuota 105 GB Kemendikbud

Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp berupa link subsidi pulsa dengan narasi bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan subsidi pulsa senilai Rp200 ribu dan kuota 105 Gigabyte (GB). Disebutkan subsidi pulsa tersebut berlaku hingga tanggal 21 Juni 2021.

Faktanya, klaim bahwa link tersebut merupakan subsidi pulsa dan kuota dari Kemendikbud adalah tidak benar. Kabar tersebut merupakan kabar bohong lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie memastikan bahwa link subsidi itu hoaks.

4 [HOAKS] Vaksin COVID-19 Pfizer Mengandung Magnet

Telah beredar di media sosial sebuah video yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 Pfizer mengandung magnet. Unggahan tersebut bertuliskan "Pfizer jab and a magnet experiment! No words left to describe this".

Faktanya, klaim yang menyebut adanya kandungan magnet di dalam vaksin COVID-19 adalah hoaks. Menurut peneliti vaksin yang juga profesor biologi sel dan perkembangan di Fakultas Kedokteran Universitas Northwestern Feinberg, Dr Thomas Hope, tidak ada kandungan magnet dalam vaksin apapun. Selain itu otoritas kesehatan di Amerika Serikat dan Kanada menyatakan vaksin COVID-19 seperti Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson atau AstraZeneca tidak ada yang berbahan dasar logam.





5

[HOAKS] Benda Bermagnet Bisa Menempel di Lengan Penerima Vaksin Corona

Beredar unggahan yang memperlihatkan benda bermagnet menempel di lengan penerima vaksin Corona. Pengunggah video tersebut mengaku telah disuntik vaksin Corona Pfizer dan mengklaim bahwa suntikan vaksin Corona mengandung *microchip* hingga akhirnya membuat benda bermagnet menempel.

Dikutip dari laman Kumparan.com yang mengutip dari Factcheck.org, Profesor dari Tulane University School of Medicine, Lisa Morici mengatakan bahwa kandungan *microchip* dalam vaksin hanyalah mitos dan narasi yang mengklaim bahwa benda bermagnet bisa menempel pada lengan penerima vaksin karena *microchip* adalah hoaks. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa bahan vaksin dengan teknologi mRNA seperti Pfizer adalah RNA/DNA, lipid, protein, garam, dan gula.

6

[HOAKS] Vaksin COVID-19 akan Membuat Flu Biasa Menjadi Lebih Mematikan

Sebuah postingan berbahasa asing di media sosial Instagram mengklaim bahwa vaksin COVID-19 akan membuat orang terpapar penyakit mematikan selama musim dingin dan flu berikutnya. Disebutkan juga bahwa vaksin COVID-19 akan membuat flu biasa menjadi lebih mematikan.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari Reuters, Daniel Kuritzkes, Kepala Divisi Penyakit Menular di Rumah Sakit Brigham and Women menegaskan, tidak ada kandungan dalam vaksin COVID-19 manapun yang akan memperparah flu biasa atau influenza, dan yang pasti tidak akan membuat infeksi menjadi lebih mematikan. Selanjutnya dilansir dari AFP, Dr Jason McKnight, asisten profesor klinis di Texas A&M College of Medicine menjelaskan jika semua vaksin COVID yang saat ini diproduksi menargetkan "protein lonjakan" spesifik dari virus corona dan tidak berefek pada virus-virus lainnya seperti virus penyebab flu biasa. Sebagaimana yang diketahui bahwa virus penyebab influenza berbeda dengan virus penyebab COVID-19.

7

[HOAKS] China Pemberi Utang Terbanyak ke Indonesia

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa China adalah pemberi utang terbesar untuk Indonesia. Dalam postingan tersebut bertuliskan "HUTANG TERBANYAK DARI CHINA TIONGKOK, ASSET TERBANYAK DIMILIKI KONGLOMERAT CHINA. INDONESIA TINGGAL TUNGGU WAKTU JADI INDOCHINA".

Faktanya, klaim bahwa China merupakan pemberi utang terbesar untuk Indonesia adalah salah. Negara pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia adalah Singapura. Menurut laporan Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari 2021 adalah US\$ 422,6 miliar. Dengan asumsi US\$ 1 setara Rp 14.646 seperti kurs tengah BI pada 15 April 2021, ULN Indonesia setara dengan Rp 6.189,39 triliun.



[HOAKS] Permintaan Sumbangan Wakaf Lailatul Qadar Mengatasnamakan KPK

Telah beredar sebuah selebaran yang berisi informasi terkait permintaan sumbangan Wakaf Lailatul Qadar yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pejabat KPK. Dalam selebaran tersebut juga menyertakan nomor rekening sebuah bank yang digunakan sebagai rekening donasi.

Faktanya, KPK melalui laman website resminya kpk.go.id, memastikan bahwa selebaran informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar dan merupakan modus penipuan. Pihaknya menegaskan, KPK secara kelembagaan maupun individu Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai KPK tidak pernah meminta sumbangan maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka penggalangan dana untuk keperluan apapun. KPK mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai Komisi. Pihaknya menambahkan, apabila mendapatkan informasi serupa, masyarakat dapat mengkonfirmasi melalui *call center* 198 atau e-mail informasi@kpk.go.id.



[HOAKS] Registrasi Vaksinasi COVID-19 di RS Hermina Kemayoran

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengabarkan bahwa terdapat pendaftaran vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk umur 18-59 tahun. Dalam informasi itu disebutkan, proses vaksinasi dilakukan mulai dari jam 08.00-14.00 dengan membawa KTP dan melakukan pendaftaran melalui link pelindungilindungi.id/register.

Faktanya, berdasarkan koordinasi Tim JalaHoaks dengan RS Hermina Kemayoran pada tanggal 7 Mei 2021 lalu, kabar yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks. "Hoaks ya. Sampai saat ini RS Hermina Kemayoran masih melayani vaksinasi COVID-19 untuk Lansia saja," kata staf RS Hermina Kemayoran. Selain itu, RS Hermina Kemayoran melalui unggahan Instagram stories di laman Instagram resminya [@rsuherminakemayoran](https://www.instagram.com/rsuherminakemayoran) mengklarifikasi bahwa informasi pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk umum usia 18-59 tahun di RS Hermina Kemayoran adalah hoaks.



[HOAKS] Pandemi Hadir Setiap 100 Tahun Sekali

Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook, terkait pandemi Virus Corona yang diklaim hadir setiap 100 tahun sekali. Dengan unggahan narasi "Dyk? 1720: wabah besar Marseille 1820: pandemik chorella di Asia 1920: flu Spanyol 2020: virus corona Ada teori bahwa setiap 100 tahun pandemi terjadi".

Dilansir dari Liputan6.com, klaim pandemi hadir setiap 100 tahun sekali adalah tidak benar. Faktanya WHO menjelaskan pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi karena COVID-19 merupakan penyakit baru.

LAPORKAN HOAKS

Telepon: +62 21 3845786
 Whatsapp: +62 8119224545
 Email: aduankonten@kominfo.go.id

113TH
KEBANGKITAN
NASIONAL

BANGKIT!
KITA BANGSA
YANG TANGGUH



**HARI KEBANGKITAN
NASIONAL**
20 MEI 2021

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika RI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841
majalahkominfonext@kominfo.go.id